



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1042, 2021

KEMENKEU. SBK. Tahun Anggaran 2022.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/PMK.02/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang

ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) SBK meliputi:
 - a. SBK Umum yaitu SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan
 - b. SBK Khusus yaitu SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. SBK Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. SBK Laporan Kinerja;
 - c. SBK Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. SBK Audit Kinerja;
 - e. SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3);
 - f. SBK Penyusunan Peraturan Menteri;
 - g. SBK Sosialisasi;
 - h. SBK Pemantauan dan Evaluasi;
 - i. SBK Kehumasan dan Informasi; dan
 - j. SBK Penelitian.

Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk Tahun Anggaran 2022;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2023; dan/atau
- d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (*output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, dan SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf i berfungsi sebagai estimasi.
- (3) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berfungsi sebagai estimasi, besarnya dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dan dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*.
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian

sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

- (4) Pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SBK Penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan SBK dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan SBK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 123 /PMK.02/2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

SBK UMUM

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran			
	a. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk Satker Eselon I/Seingkat			
	1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	51.700.000	
	2) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	410.200.000	
	3) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	758.300.000	
	4) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	1.493.100.000	
	5) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	1.725.100.000	
	b. SBK Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L)			
	1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	212.000.000	
	2) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	360.100.000	
	3) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	545.100.000	
	4) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	619.100.000	
2	Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)			
	a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Satker Eselon I/Seingkat			
	1) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	37.300.000	
	2) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	135.900.000	
	3) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	252.800.000	
	4) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	497.800.000	
	5) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	575.100.000	
	b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L)			
	1) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	70.600.000	
	2) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	120.000.000	
	3) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	181.700.000	
	4) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	206.300.000	
3	Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan			
	1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 Orang	30.261.000	
	2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	1 Orang	22.125.000	
	3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Penguwas	1 Orang	20.230.000	
	b. Layanan Pelatihan Dasar/Projabatan			
	1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	9.296.000	
	2) Layanan Pelatihan Projabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Orang	2.242.000	

85

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
4	Standar Biaya Kelembagaan Audit Kinerja			
a.	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
1)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Aceh	1 LHA	27.300.000	
2)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	25.800.000	
3)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Riau	1 LHA	25.500.000	
4)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	24.900.000	
5)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jambi	1 LHA	21.200.000	
6)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	24.300.000	
7)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	23.700.000	
8)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Lampung	1 LHA	19.700.000	
9)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bengkulu	1 LHA	22.000.000	
10)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	21.300.000	
11)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Banten	1 LHA	15.300.000	
12)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	14.400.000	
13)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	2.700.000	
14)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	19.600.000	
15)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	24.000.000	
16)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	23.900.000	
17)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bali	1 LHA	28.600.000	
18)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	25.400.000	
19)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	29.800.000	
20)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	22.400.000	
21)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	23.700.000	
22)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	23.100.000	
23)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	30.300.000	
24)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	28.200.000	
25)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	31.400.000	
26)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	31.000.000	
27)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	31.500.000	
28)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	27.300.000	
29)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	33.100.000	
30)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku	1 LHA	29.000.000	
31)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	57.100.000	
32)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua	1 LHA	54.600.000	
33)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat	1 LHA	45.400.000	
34)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat	1 LHA	48.500.000	
b.	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota			
1)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Aceh	1 LHA	58.300.000	
2)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	56.800.000	
3)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Riau	1 LHA	56.500.000	
4)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	55.800.000	
5)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jambi	1 LHA	52.200.000	
6)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	55.200.000	
7)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	54.700.000	
8)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Lampung	1 LHA	48.700.000	
9)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bengkulu	1 LHA	53.000.000	
10)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	52.200.000	
11)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Banten	1 LHA	46.200.000	
12)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	45.300.000	
13)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
14)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	50.000.000	
15)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.000.000	
16)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	54.000.000	

85

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
17)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bali	1 LHA	59.500.000	
18)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.300.000	
19)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.800.000	
20)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	53.300.000	
21)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	54.600.000	
22)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	54.100.000	
23)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	61.300.000	
24)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	59.300.000	
25)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	62.400.000	
26)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Gorontalo	1 LHA	62.000.000	
27)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	62.500.000	
28)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	58.300.000	
29)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	64.100.000	
30)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	60.000.000	
31)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku	1 LHA	68.000.000	
32)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	65.500.000	
33)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua	1 LHA	76.400.000	
34)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Barat	1 LHA	79.500.000	
c. Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi				
1)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Aceh	1 LHA	125.800.000	
2)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	121.000.000	
3)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Riau	1 LHA	142.700.000	
4)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	137.200.000	
5)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jambi	1 LHA	109.400.000	
6)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	126.300.000	
7)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	139.900.000	
8)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Lampung	1 LHA	93.600.000	
9)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bengkulu	1 LHA	115.700.000	
10)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	119.500.000	
11)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Banten	1 LHA	109.800.000	
12)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat	1 LHA	101.300.000	
13)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	103.200.000	
14)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	141.900.000	
15)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Timur	1 LHA	128.700.000	
16)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bali	1 LHA	161.600.000	
17)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	128.200.000	
18)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.900.000	
19)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	114.100.000	
20)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	124.100.000	
21)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	116.000.000	
22)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	154.900.000	
23)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	149.900.000	
24)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	152.100.000	
25)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Gorontalo	1 LHA	149.400.000	
26)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	149.400.000	
27)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	138.300.000	
28)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	167.400.000	
29)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	147.000.000	
30)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku	1 LHA	157.900.000	
31)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku Utara	1 LHA	142.700.000	
32)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua	1 LHA	203.000.000	
33)	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat	1 LHA	187.200.000	
5	Standar Biaya Keluaran Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNK3)			
a. Dokumen RSN3 yang Diusulkan dengan Adopsi Identik Metode Republikaasi-typrint				
1)	Dokumen RSN3 yang Diusulkan dengan Adopsi Identik Metode Republikaasi-typrint dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	99.060.000	
2)	Dokumen RSN3 yang Diusulkan dengan Adopsi Identik Metode Republikaasi-typrint dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	99.060.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
3)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	99.060.000	
4)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 91 s.d 100	1 SNI	99.060.000	
5)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	99.060.000	
6)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	104.135.000	
7)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	104.135.000	
8)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	104.135.000	
9)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	104.135.000	
10)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reguler dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	104.135.000	
b. Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan				
1)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	265.340.000	
2)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	260.840.000	
3)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	328.880.000	
4)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	626.780.000	
5)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	735.550.000	
6)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	850.670.000	
7)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.012.590.000	
8)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.112.790.000	
9)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.285.430.000	
10)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.385.630.000	
c. Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar				
1)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	388.823.000	
2)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	488.293.000	
3)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	640.233.000	
4)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	753.433.000	
5)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	841.933.000	
6)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	958.623.000	
7)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.100.273.000	
8)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.194.260.000	
9)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.344.230.000	
10)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Standar dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.432.730.000	
d. Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan				
1)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	390.340.000	
2)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	485.840.000	
3)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	653.880.000	
4)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	751.780.000	
5)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	860.550.000	
6)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	975.670.000	
7)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.137.590.000	
8)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.237.790.000	
9)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.410.430.000	
10)	Dokumen RSN3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.510.630.000	
6.	Standar Biaya Kelembagaan Penyusunan Peraturan Menteri			
a.	Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Internal	1 Peraturan	100.000.000	
b.	Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Eksternal	1 Peraturan	200.000.000	

85

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
7	Standar Biaya Kelembagaan Sosialisasi			
	a. Layanan Sosialisasi Berkeadilan Kecil	1 Laporan	67.500.000	
	b. Layanan Sosialisasi Berkeadilan Sedang	1 Laporan	135.000.000	
	c. Layanan Sosialisasi Berkeadilan Besar	1 Laporan	305.000.000	
8	Standar Biaya Kelembagaan Pemantauan dan Evaluasi			
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	240.000.000	
9	Standar Biaya Kelembagaan Kehumasan dan Informasi			
	Layanan Kehumasan dan Informasi	1 Layanan	458.000.000	
10	Standar Biaya Kelembagaan Penelitian			
	a. Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000	
	b. Laporan Riset Dasar			
	1) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	151.320.000	
	2) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	135.670.000	
	3) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	207.000.000	
	4) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	168.400.000	
	5) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	90.000.000	
	6) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Komersial (Hankam)	1 Laporan	235.000.000	
	7) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	170.960.000	
	8) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kemasaritan	1 Laporan	151.050.000	
	9) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	123.800.000	
	10) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	1 Laporan	120.000.000	
	11) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri	1 Laporan	230.000.000	
	12) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Local)	1 Laporan	290.000.000	
	13) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	14) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	15) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	16) Laporan Riset Dasar Tematis	1 Laporan	40.546.200	
	c. Laporan Riset Terapan			
	1) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	216.000.000	
	2) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	221.900.000	
	3) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	948.800.000	
	4) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	143.200.000	
	5) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	208.000.000	
	6) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	400.200.000	
	7) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	370.800.000	
	8) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemasaritan	1 Laporan	209.000.000	
	9) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	327.500.000	
	10) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	1 Laporan	150.000.000	
	11) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri	1 Laporan	165.000.000	
	12) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Local)	1 Laporan	290.000.000	
	13) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	14) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	15) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	d. Laporan Riset Pengembangan			
	1) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	3 Laporan	568.100.000	
	2) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT	3 Laporan	1.124.800.000	
	3) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	3 Laporan	1.048.100.000	
	4) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	3 Laporan	349.600.000	
	5) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK	3 Laporan	402.500.000	
	6) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	3 Laporan	559.600.000	
	7) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	3 Laporan	724.038.000	
	8) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemasaritan	3 Laporan	301.500.000	
	9) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	3 Laporan	1.083.700.000	
	10) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	3 Laporan	515.000.000	
	e. Laporan Kajian Aktual Strategis	1 Musnah Kebijakan	25.000.000	

85

PENJELASAN SBK UMUM	
1.	<p>Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>SBK Perencanaan dan Penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk satker eselon I/setingkat</p> <p>SBK Layanan Penyusunan RKA untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Penyusunan RKA yang digunakan oleh satker unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.</p> <p>b. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk K/L</p> <p>SBK Layanan Penyusunan RKA untuk K/L merupakan SBK Layanan Penyusunan RKA yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.</p>
2.	<p>Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)</p> <p>SBK Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.</p> <p>Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk satker eselon I/setingkat</p> <p>SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Penyusunan LAKIN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.</p> <p>Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi</p>

satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker di lingkup eselon I/setingkat tersebut.

b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L

SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L merupakan SBK Layanan Penyusunan LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

3. Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan

SBK Pendidikan dan Pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa peserta yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama, Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*;
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*.
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

4. Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja
- SBK Audit Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Inter Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan keluaran (*output*) audit kinerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:
- Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
 - Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
- Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.
- Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satker APIP.
 - SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota
SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satker APIP.
 - SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi
SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berbeda provinsi dengan lokasi satker APIP.
5. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)
- SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen RSNI yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat K/L.
- Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republicasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar

8/5

atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

- b. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.
- d. RSNI3 yang disusun dengan adopsi modifikasi metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran (*output*) akhir berupa jumlah halaman dokumen RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

6. Standar Biaya Keluaran Penyusunan Peraturan Menteri

SBK Penyusunan Peraturan Menteri merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa peraturan menteri/pimpinan lembaga yang dihasilkan dari tahap penyusunan konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan peraturan menteri/pimpinan lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Internal
SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian/lembaga berkenaan.
- b. SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Eksternal
SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan

peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian/lembaga berkenaan.

7. Standar Biaya Keluaran Sosialisasi

SBK Sosialisasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan/menyebarluaskan informasi kepada pihak terkait yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penyusunan laporan sosialisasi dan/atau diseminasi.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh pejabat eselon I/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 150 orang.

b. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh pejabat eselon I/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 400 orang.

c. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh Menteri/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 500 orang.

8. Standar Biaya Keluaran Pemantauan dan Evaluasi

SBK Pemantauan dan Evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas kebijakan strategis, meliputi penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, penyusunan laporan dan rekomendasi melalui kegiatan visitasi lapangan.

9. Standar Biaya Keluaran Kehumasan dan Informasi

SBK Kehumasan dan Informasi merupakan besaran biaya yang

Q5

digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi kebijakan kementerian/lembaga yang dilakukan dalam rangka kegiatan komunikasi publik/siaran pers.

10. Standar Biaya Keluaran Penelitian

a. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas SBK
Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.

Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- 1) Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 2) Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Dasar

SBK Laporan Riset Dasar merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Penggunaan SBK Laporan Riset Dasar mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat

dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan (konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan).

2) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

3) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

4) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

5) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

- 6) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- 7) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

- 8) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

- 9) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- 10) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.
- 11) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.
- 12) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.
- 13) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni

Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- 14) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- 15) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.
- 16) SBK Laporan Riset Dasar Teoritis
SBK Laporan Riset Dasar Teoritis merupakan kelompok yang melingkup riset-riset dibidang keilmuan dasar yang tidak ada dalam kelompok bidang fokus 10 (sepuluh) lainnya, diantaranya matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, statistika dan lainnya. Riset ini ditujukan untuk mencari ilmu pengetahuan baru, pencarian yang bersistem untuk menemukan hal yang

belum diketahui, yang belum dapat ditentukan implementasinya. Penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini merupakan dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian teoritis dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung bidang fokus lainnya. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

c. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Terapan

SBK Laporan Riset Terapan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Terapan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-

ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- 2) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

- 3) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

- 4) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

- 5) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi,

25

- pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
- 6) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.
 - 7) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif pendukung industri.
 - 8) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
 - 9) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - 10) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.

- 11) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.

- 12) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian

- bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.
- 13) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)
- SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- 14) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
- SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- 15) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
- SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset

yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

d. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pengembangan

SBK Laporan Riset Pengembangan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

1) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

85

- 2) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.
- 3) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- 4) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- 5) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan

- pemindahan informasi antarmedia.
- 6) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.
 - 7) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
 - 8) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan.
 - 9) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - 10) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan merupakan SBK

Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

c. Standar Biaya Keluaran Laporan Aktual Strategis

SBK Laporan Kajian Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Catatan Umum:

1. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, TIK, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
2. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial, Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;

- c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. buku nasional;
 - f. buku internasional;
 - g. naskah kebijakan;
 - h. artikel populer di media cetak;
 - i. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks; dan/atau
 - l. karya seni (tari, patung, lukisan, puisi, musik).
3. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru;
 - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - p. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - q. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
4. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;

- c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
5. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru; dan/atau
 - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional.
6. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;

- g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
 - t. paten sederhana terdaftar;
 - u. merek dagang terdaftar;
 - v. desain industri terdaftar;
 - w. rahasia dagang terdaftar;
 - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - z. indikasi geografis terdaftar.
7. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);

- k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;
 - t. paten sederhana terdaftar;
 - u. merek dagang terdaftar;
 - v. desain industri terdaftar;
 - w. rahasia dagang terdaftar;
 - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - z. indikasi geografis terdaftar.
8. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;

- o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - s. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
 - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
 - v. prototipe laik *preklinis*;
 - w. herbal terstandar;
 - x. paten sederhana terdaftar;
 - y. merek dagang terdaftar;
 - z. desain industri terdaftar;
 - aa. rahasia dagang terdaftar;
 - bb. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - cc. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
 - dd. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
 - ee. fitofarmaka.
9. Terhadap SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. paten sederhana terdaftar;
 - l. merek dagang terdaftar;
 - m. desain industri terdaftar;

- 37 -

- n. rahasia dagang terdaftar;
 - o. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - p. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - q. indikasi geografis terdaftar.
10. Terhadap SBK Laporan Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal Internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
 - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*;
 - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*;
 - n. paten sederhana terdaftar;
 - o. merek dagang terdaftar;
 - p. desain industri terdaftar;
 - q. rahasia dagang terdaftar;
 - r. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - s. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
 - t. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
 - u. fitofarmaka.

11. Besaran tambahan biaya SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000

No	Uraian	Besaran
3	Publikasi/artikel jurnal internasional	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi	50.000.000
5	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional	2.000.000
6	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional	5.000.000
7	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	10.000.000
8	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
9	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
10	Paten terdaftar	75.000.000
11	Paten <i>granted</i>	80.000.000
12	Paten terpakai di industri	90.000.000
13	Paten Sederhana terdaftar	25.000.000
14	Merek Dagang terdaftar	75.000.000
15	Desain Industri terdaftar	75.000.000
16	Rahasia Dagang terdaftar	75.000.000
17	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar	75.000.000
18	Perlindungan Varietas Tanaman terdaftar	75.000.000
19	Indikasi geografis terdaftar	75.000.000
20	Buku nasional	30.000.000
21	Buku internasional	65.000.000
22	Karya Seni (Tari, Patung, Lukisan, Puisi, Musik)	50.000.000
23	Naskah kebijakan	25.000.000
24	Artikel populer di media cetak	2.000.000
25	Material untuk produk biologi	50.000.000
26	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
27	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000

No	Uraian	Besaran
28	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
29	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
30	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
31	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
32	Temuan senyawa/ <i>sequence</i> DNA penambahan	100.000.000
33	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
34	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
35	Galur perbaikan	150.000.000
36	PVT/Varietas terdaftar	1.000.000.000
37	PVT/Varietas terdaftar ornamental	100.000.000
38	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
39	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
40	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
41	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
42	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
43	Jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
44	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
45	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
46	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
47	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> ;	1.000.000.000

No	Uraian	Besaran
48	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> ;	6.000.000.000
49	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> .	10.000.000.000
50	Herbal terstandar	200.000.000
51	Fitofarmaka	200.000.000
52	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

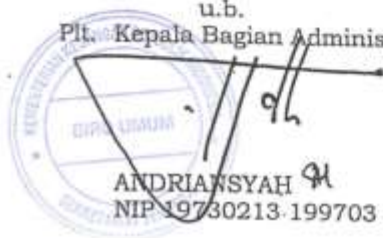
12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP.19730213-199703 1 001

A small, handwritten mark or signature in black ink, possibly initials, located at the bottom right of the page.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 123 /PMK.02/2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

SBK KHUSUS

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Sesaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
1	LHP LHP	1 LHP	10.633.337.000	
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
2	Laporan Hasil Penilaian Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 Laporan	1.112.385.000	
3	Laporan Hasil Review Kelembagaan	6 Laporan	2.622.895.000	
4	Laporan Restu atas Konsep LK BPK	4 Laporan	2.736.088.000	
5	Laporan Restu atas Konsep RKA BPK	1 Laporan	245.510.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
6	LHP AKN I	1 LHP	1.223.587.000	
7	LHP AKN II	1 LHP	1.320.355.000	
8	LHP AKN III	1 LHP	717.701.000	
9	LHP AKN IV	1 LHP	1.685.695.000	
10	LHP AKN V	1 LHP	1.331.346.000	
11	LHP AKN VI	1 LHP	1.381.786.000	
12	LHP AKN VII	1 LHP	1.220.355.000	
13	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 LHP	267.232.000	
14	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 LHP	226.366.000	
15	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 LHP	309.456.000	
16	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 LHP	282.346.000	
17	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 LHP	269.152.000	
18	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 LHP	246.161.000	
19	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 LHP	313.332.000	
20	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 LHP	263.688.000	
21	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 LHP	259.330.000	
22	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 LHP	298.107.000	
23	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 LHP	289.012.000	
24	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 LHP	276.377.000	
25	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	876.913.000	
26	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 LHP	256.337.000	
27	LHP BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta	1 LHP	308.547.000	
28	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 LHP	290.309.000	
29	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 LHP	331.430.000	
30	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHP	273.912.000	
31	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHP	270.496.000	
32	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 LHP	256.883.000	
33	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHP	287.996.000	
34	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHP	282.920.000	
35	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 LHP	322.394.000	
36	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 LHP	284.795.000	
37	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 LHP	310.091.000	
38	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 LHP	256.781.000	
39	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHP	295.399.000	
40	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHP	318.621.000	
41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHP	291.290.000	
42	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	296.066.000	
43	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 LHP	290.953.000	
44	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 LHP	388.563.000	
45	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 LHP	303.708.000	
46	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	320.007.000	
47	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN I	1 Laporan	155.350.000	
48	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN II	1 Laporan	155.350.000	
49	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN III	1 Laporan	155.350.000	
50	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN IV	1 Laporan	155.350.000	
51	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN V	1 Laporan	155.350.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)		dalam rupiah		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Beasiswa	Keterangan
1	2	3	4	5
52	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VI	1 Laporan	155.350.000	
53	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VII	1 Laporan	155.350.000	
54	LHP Interim/Pendahuluan AKN I	1 Laporan	431.578.000	
55	LHP Interim/Pendahuluan AKN II	1 Laporan	530.507.000	
56	LHP Interim/Pendahuluan AKN III	1 Laporan	228.634.000	
57	LHP Interim/Pendahuluan AKN IV	1 Laporan	584.008.000	
58	LHP Interim/Pendahuluan AKN V	1 Laporan	431.578.000	
59	LHP Interim/Pendahuluan AKN VI	1 Laporan	584.013.000	
60	LHP Interim/Pendahuluan AKN VII	1 Laporan	431.578.000	
61	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 Laporan	194.996.000	
62	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	159.187.000	
63	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 Laporan	216.031.000	
64	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	214.428.000	
65	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 Laporan	196.984.000	
66	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	178.498.000	
67	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	237.411.000	
68	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 Laporan	193.517.000	
69	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 Laporan	171.243.000	
70	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	213.755.000	
71	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 Laporan	213.773.000	
72	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	203.106.000	
73	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	407.255.000	
74	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	189.058.000	
75	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Laporan	235.078.000	
76	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	206.443.000	
77	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 Laporan	246.220.000	
78	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	179.827.000	
79	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	195.871.000	
80	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	187.168.000	
81	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	207.706.000	
82	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	208.714.000	
83	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	243.805.000	
84	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	213.779.000	
85	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 Laporan	224.379.000	
86	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	186.994.000	
87	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	213.972.000	
88	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	241.348.000	
89	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	220.969.000	
90	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 Laporan	225.738.000	
91	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	219.379.000	
92	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 Laporan	293.037.000	
93	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 Laporan	210.959.000	
94	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	244.307.000	
95	LHP Tematik AKN I	1 LHP	7.954.256.000	
96	LHP Tematik AKN II	1 LHP	7.954.256.000	
97	LHP Tematik AKN III	1 LHP	7.954.256.000	
98	LHP Tematik AKN IV	1 LHP	7.954.256.000	
99	LHP Tematik AKN V	1 LHP	7.954.256.000	
100	LHP Tematik AKN VI	1 LHP	7.954.256.000	
101	LHP Tematik AKN VII	1 LHP	7.954.256.000	
Pemeriksaan Keuangan Negara				
102	Laporan Hasil Review atas SPM Kinerja - Pemeriksaan	1 Laporan	189.885.000	
103	Laporan Hasil Pemeriksaan Internal BPK	1 Laporan	186.035.000	
104	Laporan Pemeriksaan	1 Laporan	157.054.000	
105	Laporan Review Integritas	1 Laporan	167.859.000	
Pemeriksaan Keuangan Negara				
106	Kurikulum Diklat Jarak	1 Perangkat	46.619.000	
107	Silabus dan Bahan Ajar Diklat Jarak	1 Perangkat	157.796.000	
108	Rencana dan Bahan Ajar Diklat Yuridis	1 Perangkat	59.770.000	
109	Diklat Jabatan Fungsional - Pemeriksaan	1 Angkatan	495.308.000	
110	Diklat Peningkatan Kompetensi SOM	1 Angkatan	144.963.000	
111	Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	106.129.000	
112	Diklat Regulasi Akuntansi Publik	1 Angkatan	102.502.000	
113	Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional	1 Angkatan	96.841.000	
Pemeriksaan Keuangan Negara				
114	LHP Auditasi Utama Investigasi	1 LHP	665.721.000	
115	Laporan Penelitian Informasi Awal	1 Laporan	60.887.000	
116	Laporan Pembinaan Ketersangan AKA	1 Laporan	27.312.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	Kepaniteraan SBK Indeks Biaya Keluaran Perkara Hukum Perseorangan			
	1. Putusan Perkara Pidana	1 Perkara	1.650.000	
	2. Putusan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	950.000	
	3. Putusan Perkara PH yang Nilai Gugatannya di Bawah 150 jt.	1 Perkara	835.000	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Indeks Biaya Keluaran Perkara Hukum Perseorangan			
	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat	1 perkara	556.000	
	2. Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat	1 perkara	750.000	
	3. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 perkara	770.000	
	4. Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 perkara	990.000	
	5. Perkara PH (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 perkara	1.349.000	
	6. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	1 perkara	560.000	
	7. Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	1 perkara	765.000	
	8. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 perkara	775.000	
	9. Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 perkara	1.000.000	
	10. Perkara PH (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 perkara	1.349.000	
	11. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	1 perkara	610.000	
	12. Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	1 perkara	970.000	
	13. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 perkara	775.000	
	14. Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 perkara	1.085.000	
	15. Perkara PH (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 perkara	1.550.000	
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) SBK Indeks Biaya Keluaran Perkara Hukum Perseorangan			
	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	440.000	
	2. Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	710.000	
	3. Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan	1 Perkara	1.320.000	
	4. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan	1 Perkara	400.000	
	5. Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1 Perkara	1.380.000	
	6. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1 Perkara	400.000	
	7. Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1 Perkara	1.470.000	
	8. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1 Perkara	420.000	
	9. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 01 Banda Aceh	1 Perkara	1.210.000	
	10. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 02 Medan	1 Perkara	1.405.000	
	11. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 03 Padang	1 Perkara	1.170.000	
	12. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 04 Palembang	1 Perkara	1.345.000	
	13. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 05 Pontianak	1 Perkara	1.310.000	
	14. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 06 Banjarmasin	1 Perkara	1.064.000	
	15. Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 07 Balikpapan	1 Perkara	1.682.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
16	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL II - 08 Jakarta	1 Perkara	1.274.000	
17	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL II - 09 Bandung	1 Perkara	1.485.000	
18	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL II - 10 Semarang	1 Perkara	1.404.000	
19	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL II - 11 Yogyakarta	1 Perkara	1.515.000	
20	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 12 Surabaya	1 Perkara	1.345.000	
21	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 13 Malang	1 Perkara	1.415.000	
22	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 14 Denpasar	1 Perkara	1.440.000	
23	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 15 Kupang	1 Perkara	1.315.000	
24	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 16 Makassar	1 Perkara	1.455.000	
25	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 17 Manado	1 Perkara	1.574.000	
26	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 18 Ambon	1 Perkara	1.825.000	
27	Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DELMIL III - 19 Jayapura	1 Perkara	2.660.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	Sekretariat Jenderal			
	SDK Total Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	1 Literatur	30 Literatur	1.305.430.000	
	2 Modul	77 Modul	2.422.302.000	
	3 PPS/PTM	190 PPS/PTM	1.703.136.000	
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
	4 Pengabdian Masyarakat Lingkup P2D	25 Rekomendasi	3.240.568.000	
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Standarisi Profesi dan SDM			
	5 Pendidikan Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian	1 Batch	112.096.000	
	6 Pendidikan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian	1 Batch	122.136.000	
	7 Pendidikan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian	1 Batch	122.350.000	
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	1 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	1 Angkatan	76.920.000	
	2 Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	1 Angkatan	87.875.000	
	3 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1 Angkatan	76.920.000	
	4 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Kepanitiaan dan Manajemen Keperintahan	1 Angkatan	76.920.000	
	5 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Angkatan	76.920.000	
	6 Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Angkatan	143.313.000	
	7 Pengembangan Kompetensi 14 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Angkatan	171.550.000	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	8 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Penyusunan Dokumen Perencanaan SPM di Daerah Lingkup Regional	1 Angkatan	76.920.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	Kementerian Pertahanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
1	Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (<i>Non Litigasi</i>)	1 Orang	8.737.000	
	Perkara Hukum Perseorangan			
2	Pemfapan dan Saran Hukum (<i>Legal Opinion</i>)	1 Perkara	930.000	
	Perkara Hukum Lembaga			
3	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terdaftar Tk. 1 Rayon 1	1 Laporan	27.107.000	
4	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terdaftar Tk. 1 Rayon 2	1 Laporan	31.606.000	
5	Laporan Dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 1	1 Laporan	9.819.000	
6	Laporan Dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 2	1 Laporan	11.693.000	
7	Laporan Dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 4	1 Laporan	10.355.000	
8	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kassa Rayon 1	1 Laporan	14.856.000	
9	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kassa Rayon 2	1 Laporan	16.945.000	
10	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Pk Rayon 1	1 Laporan	15.958.000	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
11	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1	1 Orang	5.471.000	
12	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2	1 Orang	5.471.000	
13	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Orang	5.471.000	
14	Kursus Intensif Bahasa Inggris Executive	1 Orang	5.471.000	
15	Kursus Intensif Bahasa Inggris Persiapan IELTS	1 Orang	5.471.000	
16	Kursus Intensif Bahasa Inggris Arah Bahasa	1 Orang	5.471.000	
17	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 1	1 Orang	7.103.000	
18	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 2	1 Orang	7.103.000	
19	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 3	1 Orang	7.103.000	
20	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Menengah	1 Orang	7.103.000	
21	Kursus Intensif Bahasa Indonesia bagi Perwira SAP	1 Orang	7.103.000	
22	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Bagi Calon Mahasiswa Asing Unhan Tahap 1	1 Orang	7.015.000	
23	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Bagi Calon Mahasiswa Asing Unhan Tahap 2	1 Orang	7.015.000	
24	Kursus Intensif Bahasa Arab Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
25	Kursus Intensif Bahasa Jepang Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
26	Kursus Intensif Bahasa Jerman Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
27	Kursus Intensif Bahasa Korea Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
28	Kursus Intensif Bahasa Mandarin Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
29	Kursus Intensif Bahasa Perancis Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
30	Kursus Intensif Bahasa Rusia Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
31	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Gelombang 1	1 Orang	5.471.000	
32	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Gelombang 2	1 Orang	5.471.000	
33	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Gelombang 3	1 Orang	5.471.000	
34	Kursus Intensif Bahasa Arab bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB	1 Orang	5.471.000	
35	Kursus Intensif Bahasa Prancis bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Gelombang 1	1 Orang	5.471.000	
36	Kursus Intensif Bahasa Prancis bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Gelombang 2	1 Orang	5.471.000	
37	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah 1	1 Orang	5.471.000	
38	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah 2	1 Orang	5.471.000	
39	Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Orang	7.847.600	
40	Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Orang	6.379.014	
41	Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Orang	5.541.211	
42	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	5.931.611	
43	Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Orang	5.888.055	
44	Kursus Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pertahanan	1 Orang	5.606.983	
45	Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan	1 Orang	5.391.755	
46	Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Orang	5.436.933	
47	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Perula	1 Orang	5.610.733	
48	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	4.128.000	
49	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Ahli	1 Orang	7.931.000	
50	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1 Orang	453.000	

B/S

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
51	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Terampil	1 Orang	470.000	
52	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Terapis Gigi Dan Mulut	1 Orang	453.000	
53	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Elektronik	1 Orang	665.000	
54	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Audit Pengalasan Beras Dan Jaso	1 Orang	635.000	
55	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Presentasi Dengan Model Animasi	1 Orang	556.000	
56	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembuatan Presentasi Ektid	1 Orang	556.000	
57	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembuatan Video Pembelajaran	1 Orang	556.000	
58	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat II	1 Orang	5.141.000	
59	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat III	1 Orang	5.241.000	
60	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS Gelombang I	1 Orang	5.235.000	
61	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan II bagi PNS Gelombang II	1 Orang	5.235.000	
62	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS Gelombang III	1 Orang	5.235.000	
63	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS Gelombang IV	1 Orang	5.235.000	
64	Latihan Dasar CPNS Kementerian Pertahanan	1 Orang	7.800.000	
65	Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat Perguruan Tinggi/Selindang	1 Orang	6.205.000	
66	Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SMA/Selingkat	1 Orang	6.205.000	
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan				
67	Perekrutan Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	5.857.090	
68	Perekrutan Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	5.998.320	
69	Perekrutan Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	6.281.420	
70	Perekrutan Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	5.893.430	
71	Perekrutan Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	10.438.400	
72	Latihan Dasar Militer Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	41.082.960	
73	Latihan Dasar Militer Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	42.164.240	
74	Latihan Dasar Militer Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	42.724.440	
75	Latihan Dasar Militer Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	42.510.560	
76	Latihan Dasar Militer Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	49.206.720	
77	Latihan Penyebaran Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	18.521.380	
78	Latihan Penyebaran Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	18.978.860	
79	Latihan Penyebaran Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	19.629.060	
80	Latihan Penyebaran Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	18.965.180	
81	Latihan Penyebaran Komrad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	24.761.340	
012.21	Markas Besar TNI			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
1	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Orang	131.500	
2	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Orang	138.500	
3	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Orang	141.500	
4	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Orang	144.500	
5	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Orang	216.500	
6	Juknis Pembinaan Napi Prajurit	1 Orang	2.520.000	
	Perkara Hukum Perseorangan			
7	Pengurusan Tabanan Sementara	1 Perkara	49.000	
8	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	45.530.000	
9	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	50.530.000	
10	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	53.890.000	
11	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	47.060.000	
12	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	151.070.000	
13	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer di Otmiti Rayon 1	1 Perkara	99.660.000	
14	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer di Otmiti Rayon 2	1 Perkara	119.860.000	
15	Penuntutan dan Pengalihan Perkara Pidana Militer di Otmiti Rayon 3	1 Perkara	139.910.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Urutan	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	16	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Omnid Rayon 4	1 Perkara	139.910.000	
	17	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Omnid Rayon 5	1 Perkara	186.910.000	
	18	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	5.144.000	
	19	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	5.158.000	
	20	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	5.778.000	
	21	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	6.273.000	
	22	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	5.324.000	
	23	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	18.851.000	
	24	Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.032.000	
	25	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.100.000	
	26	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.180.000	
	27	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.240.000	
	28	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.100.000	
	29	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.820.000	
	30	Penunjuk Teknis Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.070.000	
	31	Lelang Sita Rampasan	1 Perkara	44.285.000	
	32	Kelelahan Orang Dan Barang	1 Perkara	16.778.000	
	33	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I	1 Perkara	18.772.000	
	34	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	13.168.000	
	35	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	11.018.000	
	36	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	12.880.000	
	37	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Perkara	27.502.000	
	38	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	15.373.000	
	39	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	12.081.000	
	40	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	17.812.000	
	41	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Perkara	44.366.000	
	42	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Perkara	20.027.000	
	43	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Perkara	25.927.000	
	44	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Perkara	23.283.000	
	45	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I	1 Perkara	118.793.000	
	46	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terhading Tk. Banding	1 Perkara	21.335.000	
	47	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Perkara	26.641.000	
	48	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Perkara	26.146.000	
	49	Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Perkara	16.054.000	
	50	Pendapat dan Saran Hukum	1 Perkara	945.000	
	51	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	23.530.000	
	52	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.285.000	
	53	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana	1 Perkara	13.387.000	
	Operasi Bidang Pertahanan				
	54	Peserta Pengelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Operasi	369.368	
	55	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon I	1 Operasi	115.994	
	56	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon II	1 Operasi	118.094	
	57	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon III	1 Operasi	116.994	
	58	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon IV	1 Operasi	121.194	
	59	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon V	1 Operasi	124.294	
	60	Rahwan Rayon I	1 Operasi	146.994	
	61	Rahwan Rayon II	1 Operasi	149.094	
	62	Rahwan Rayon III	1 Operasi	148.094	
	63	Rahwan Rayon IV	1 Operasi	152.194	
	64	Rahwan Rayon V	1 Operasi	155.294	
	65	Seleksi Satgas Yonmek UNIFIL	1 Operasi	2.298.031	
	66	Kegiatan Tugas Yonmek UNIFIL	1 Operasi	6.906.605	
	67	Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL	1 Operasi	1.908.988	
	68	Seleksi 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	2.713.268	
	69	Kegiatan 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	3.275.323	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
70	Kegiatan Satgas PPC UNIFIL	1 Operasi	2.809.592	
71	Kegiatan Satgas MPU UNIFIL	1 Operasi	5.975.000	
72	Kegiatan Satgas PHOSU UNIFIL	1 Operasi	7.658.666	
73	Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL	1 Operasi	11.664.444	
74	Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL	1 Operasi	27.919.857	
75	Kegiatan Satgas Level II UNIFIL	1 Operasi	21.568.777	
76	Gabungan Gelar Siap dan Rotasi 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	3.635.703	
77	Gabungan Purna Tugas 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	2.479.401	
78	Seleksi Satgas MTF	1 Operasi	5.202.719	
79	Kegiatan Satgas MTF	1 Operasi	10.485.766	
80	Purna Tugas Satgas MTF	1 Operasi	1.758.757	
81	Seleksi Satgas Yon RDB MONUSCO	1 Operasi	2.244.061	
82	Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 Operasi	7.343.914	
83	Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO	1 Operasi	1.872.352	
84	Seleksi Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 Operasi	3.328.685	
85	Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 Operasi	6.822.045	
86	Gelar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO	1 Operasi	2.430.685	
87	Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO	1 Operasi	1.524.834	
88	Seleksi Satgas Klat Minusca Car	1 Operasi	3.188.757	
89	Kegiatan Satgas Minusca Car	1 Operasi	8.195.840	
90	Purna Tugas Satgas Klat Minusca Car	1 Operasi	1.782.980	
91	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 Operasi	76.688	
92	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 Operasi	80.788	
93	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 Operasi	79.788	
94	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 Operasi	81.888	
95	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V	1 Operasi	83.888	
96	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I	1 Operasi	163.648	
97	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II	1 Operasi	166.648	
98	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III	1 Operasi	173.748	
99	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV	1 Operasi	173.748	
100	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V	1 Operasi	181.848	
101	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 Operasi	124.441	
102	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 Operasi	131.441	
103	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 Operasi	130.441	
104	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 Operasi	136.441	
105	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 Operasi	139.441	
106	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komson TNI Terpadu	1 Operasi	230.520	
107	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komson TNI Rayon I	1 Operasi	244.657	
108	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komson TNI Rayon II	1 Operasi	251.657	
109	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komson TNI Rayon III	1 Operasi	250.657	
110	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komson TNI Rayon IV	1 Operasi	256.657	
111	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komson TNI Rayon V	1 Operasi	259.657	
112	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I	1 Operasi	107.605	
113	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II	1 Operasi	114.605	
114	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 Operasi	113.605	
115	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 Operasi	119.605	
116	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 Operasi	122.605	
117	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I	1 Operasi	99.106	
118	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II	1 Operasi	106.106	
119	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III	1 Operasi	105.106	
120	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV	1 Operasi	111.106	
121	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V	1 Operasi	114.106	
122	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Puntas, Pam Rahwan dan Pam Puler	1 Operasi	183.130	
123	Peserta Pengeluaran Satgas Opa Intelijen Strategi TNI	1 Operasi	478.911	
124	Peserta Operasi Siber TNI	1 Operasi	288.230	
Operasi Bidang Keamanan				
125	Pengeluaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Patri Wilayah I	1 Operasi	159.455	
126	Pengeluaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Patri Wilayah II	1 Operasi	169.375	
127	Pengeluaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Patri Wilayah III	1 Operasi	168.135	
128	Pengeluaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Patri Wilayah IV	1 Operasi	174.335	
129	Pengeluaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Patri Wilayah V	1 Operasi	186.735	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
130	Seleksi Penerimaan (Worolng) Calon Pa PK TNI	1 Orang	18.239.615	
131	Seleksi Penerimaan (Worolng) Calon Pa PSDP Pnb TNI	1 Orang	19.493.885	
132	Seleksi Penerimaan (Worolng) Mahasiswa Bessiswa TNI Calon	1 Orang	19.940.269	
133	Penerimaan CPNS UO Mabes TNI	1 Orang	1.650.325	
134	Diluat Alih PNS	1 Orang	7.336.875	
135	Lulusan Dikma Chandradimuka Caprotar (Pria)	1 Orang	45.291.000	
136	Lulusan Dikma Chandradimuka Caprotar (Wanita)	1 Orang	51.476.400	
137	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1 Orang	10.140.000	
138	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar Lanjulan	1 Orang	5.070.000	
139	Pendidikan Pertama PSDP Penerbang TNI	1 Orang	28.700.028	
140	Pendidikan Lanjutan PSDP PNB TNI	1 Orang	147.109.714	
141	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI	1 Orang	70.295.417	
142	Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI	1 Orang	74.338.487	
143	Seleksi Caste Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.249.385	
144	Lulusan Sesko TNI	1 Orang	56.790	
145	Dilopsgab Sesko TNI	1 Orang	83.698	
146	Taropsgab Sesko TNI	1 Orang	72.143	
147	Lulusan Dikbangspea Suspa TNI	1 Orang	15.020.250	
148	Lulusan Dikbangspea Susda TNI	1 Orang	13.226.000	
149	Lulusan Dikbangspea SIP TNI	1 Orang	89.483.500	
150	Lulusan Dikbangspea Susjabamil	1 Orang	15.534.250	
151	Lulusan Dikbangspea Susjabornil	1 Orang	16.782.500	
152	Lulusan Dikbangspea Saugati Bintal	1 Orang	15.500.800	
153	Lulusan Dik SAR TNI	1 Orang	15.566.000	
154	Lulusan Kursus Penanggulangan Bencana Alam	1 Orang	15.557.000	
155	Kursus Dasar Perwira Intelijen	1 Orang	5.165.000	
156	Kursus Perwira Kontra Intelijen	1 Orang	5.396.000	
157	Kursus Perwira Intelijen Strategi	1 Orang	5.090.000	
158	Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.797.777	
159	Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.537.500	
160	Kursus Dasar Bintara Intelijen	1 Orang	4.590.000	
161	Kursus Perwira Siber Dan Intelijen	1 Orang	5.674.074	
162	Kursus Bintara Siber Dan Intelijen	1 Orang	5.533.333	
163	Kursus Perwira Intelijen Medis	1 Orang	5.373.333	
164	Kursus Perwira Intelijen Ekonomi	1 Orang	5.930.833	
165	Pembekalan Intelijen	1 Orang	1.200.000	
166	Kursus Perwira Interrogator	1 Orang	6.078.000	
167	Kursus Bintara Interrogator	1 Orang	5.950.000	
168	Seleksi Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.674.454	
169	Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.211.363	
170	Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303	
171	Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303	
172	Seleksi Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.860.375	
173	Seleksi Kursus Perwira Intelijen	1 Orang	876.562	
174	Seleksi Kursus Bintara Intelijen	1 Orang	851.562	
175	Penataran/Latihan Gabungan Bangspea	1 Orang	167.000	
176	Penataran/Latihan PA Bangspea	1 Orang	167.000	
177	Penataran/Latihan BA Bangspea	1 Orang	165.750	
178	Penataran/Latihan TA Bangspea	1 Orang	164.500	
179	Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelijen (SMAI)	1 Orang	10.646.000	
180	Kursus Perwira Intelijen Teknik	1 Orang	5.946.666	
181	Kursus Bintara Intelijen Teknik	1 Orang	5.760.000	
182	Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.843.418	
183	Kursus Perwira Pengalangan	1 Orang	5.560.000	
184	Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.519.733	
185	Kursus Perwira Lihpera	1 Orang	5.560.000	
186	Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.731.497	
187	Penataran Istri Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.177.924	
188	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	5.413.777	
189	Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial	1 Orang	4.572.666	
190	Lulusan Sekolah Terpadu TNI	1 Orang	9.798.272	
191	Kursus Sandi Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.651.915	
192	Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.400.000	
193	Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.900.000	
194	Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.131.212	
195	Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.907.395	
196	Kursus Komputer Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.651.915	
197	Lulusan Kursus Perwira Siber TNI	1 Orang	17.018.000	
198	Seleksi Sus Jab Oditor Militer	1 Orang	6.188.333	
199	Seleksi Sus Jab Hakim Militer	1 Orang	6.188.333	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
200	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.371.575	
201	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	125.612	
202	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I	1 Orang	142.138	
203	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II	1 Orang	142.738	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	204 Peserta Latihan Keselingsugan Operasi Wilayah III	1 Orang	143.338	
	205 Peserta Latihan Keselingsugan Operasi Wilayah IV	1 Orang	143.938	
	206 Peserta Latihan Keselingsugan Operasi Wilayah V	1 Orang	144.338	
	207 Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpas TNI	1 Orang	163.616	
	208 Peserta Latihan Pungsi Teknis Balakpas TNI	1 Orang	134.875	
	209 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah I)	1 Orang	106.104	
	210 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	108.633	
	211 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	113.804	
	212 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	118.975	
	213 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Pamantas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	127.004	
	214 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah I)	1 Orang	101.407	
	215 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	103.691	
	216 Peserta Latihan Pratinugas Operasi Satgas Intel	1 Orang	165.159	
012.22	Markas Besar TNI AD			
	SBK Indeks Biaya Kesehatan			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	3.300.000	
	2 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.000.000	
	3 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.500.000	
	4 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.000.000	
	5 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.500.000	
	6 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.000.000	
	7 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.500.000	
	8 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.000.000	
	9 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.500.000	
	10 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Orang	7.000.000	
	11 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.000.000	
	12 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.500.000	
	13 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.000.000	
	14 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.500.000	
	15 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Orang	8.000.000	
	16 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.000.000	
	17 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.500.000	
	18 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.000.000	
	19 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.500.000	
	20 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	9.000.000	
	21 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpas, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.000.000	
	22 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpas, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.500.000	
	23 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpas, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.000.000	
	24 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpas, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.500.000	
	25 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpas, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	6.000.000	
	26 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.000.000	
	27 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.500.000	
	28 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.000.000	
	29 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.500.000	
	30 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.000.000	
	31 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	1.500.000	
	32 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	2.000.000	
	33 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	2.500.000	
	34 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.000.000	

SK

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan [012]

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
35	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latoesar Ter)	1 Orang	3.500.000	
36	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	3.500.000	
37	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	4.000.000	
38	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	4.500.000	
39	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	5.000.000	
40	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	5.500.000	
41	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	4.000.000	
42	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	4.500.000	
43	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	5.000.000	
44	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	5.500.000	
45	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latoesar Ter)	1 Orang	6.000.000	
46	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latoesar Intel)	1 Orang	1.000.000	
47	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latoesar Intel)	1 Orang	1.500.000	
48	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latoesar Intel)	1 Orang	2.000.000	
49	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latoesar Intel)	1 Orang	2.500.000	
50	Latihan Perorangan Matri Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latoesar Intel)	1 Orang	3.000.000	
51	Latihan Bersama Internasional di LN dengan (Gun Pesawat Komersil)	1 Orang	3.645.205.000	
52	Latihan Bersama Internasional di LN dengan (Gun Pesawat TNI AU)	1 Orang	3.513.740.000	
53	Latihan Bersama di DN Tanpa Alutsista	1 Orang	1.236.210.000	
54	Latihan Bersama Internasional di DN dengan Pelibatan Alutsista	1 Orang	1.373.555.000	
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Orang	6.555.000	
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Orang	7.016.000	
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Orang	7.348.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Orang	6.705.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Orang	16.345.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Orang	2.521.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Orang	2.511.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Orang	2.950.000	
63	Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Orang	906.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Orang	13.408.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Orang	15.392.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Orang	16.707.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Orang	14.039.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Orang	52.727.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Orang	4.621.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Orang	3.548.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Orang	6.370.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I	1 Orang	29.157.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Orang	33.280.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Orang	36.227.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	30.499.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Orang	120.478.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	8.473.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	9.222.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	9.758.000	

BS

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	8.687.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	24.912.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	14.163.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	15.502.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	16.520.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	15.127.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	40.091.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	12.004.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	12.807.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	13.396.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	12.379.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	28.753.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Orang	27.107.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Orang	31.606.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Orang	34.820.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	28.392.000	
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Orang	127.668.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	9.819.000	
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	11.693.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	13.032.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	10.355.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Perbanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	51.014.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	14.856.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	16.945.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	18.498.000	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	16.034.000	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	57.116.000	
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	15.058.000	
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	18.057.000	
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	20.200.000	
110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	15.915.000	
111	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	80.734.000	
112	Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)	1 Orang	906.000	
113	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1	1 Orang	10.290.000	
114	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2	1 Orang	10.999.000	
115	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3	1 Orang	11.818.000	
116	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4	1 Orang	12.182.000	
117	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5	1 Orang	43.811.000	
Perkara Hukum Perseorangan				
118	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Perkara	9.365.000	
119	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Perkara	10.070.000	
120	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Perkara	10.545.000	
121	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Perkara	9.645.000	
122	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Perkara	23.450.000	
123	Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I	1 Perkara	6.242.000	
124	Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II	1 Perkara	6.643.000	
125	Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III	1 Perkara	6.902.000	
126	Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV	1 Perkara	6.357.000	
127	Penyidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V	1 Perkara	13.017.000	
128	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Perkara	2.315.000	
129	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Perkara	2.480.000	
130	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Perkara	2.585.000	
131	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Perkara	2.355.000	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
132	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Perkara	5.700.000	
133	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Perkara	9.970.000	
134	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Perkara	10.400.000	
135	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Perkara	11.000.000	
136	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Perkara	10.000.000	
137	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Perkara	13.000.000	
138	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon I	1 Perkara	13.201.000	
139	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon II	1 Perkara	13.865.000	
140	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon III	1 Perkara	15.035.000	
141	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon IV	1 Perkara	13.370.000	
142	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon V	1 Perkara	17.380.000	
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan				
143	Koptar Pria	1 Orang	4.943.000	
144	Koptar Wanita	1 Orang	4.943.000	
145	Sertar Pria	1 Orang	5.171.000	
146	Sertar Wanita	1 Orang	5.171.000	
147	Sernadatar Pria	1 Orang	5.357.000	
148	Sernadatar Wanita	1 Orang	5.357.000	
149	Sernatutar Pria	1 Orang	5.577.000	
150	Sernatutar Wanita	1 Orang	5.577.000	
151	Dikmaha Pria Rayon I	1 Orang	3.593.000	
152	Dikmaha Pria Rayon II	1 Orang	3.643.000	
153	Dikmaha Pria Rayon III	1 Orang	3.808.000	
154	Dikmaha Pria Rayon IV	1 Orang	3.857.000	
155	Dikmaha Pria Rayon V	1 Orang	4.051.000	
156	Dikmaha Wanita	1 Orang	3.593.000	
157	Dikmata Rayon I	1 Orang	3.373.000	
158	Dikmata Rayon II	1 Orang	3.425.000	
159	Dikmata Rayon III	1 Orang	3.588.000	
160	Dikmata Rayon IV	1 Orang	3.627.000	
161	Dikmata Rayon V	1 Orang	3.821.000	
162	Pria Dikma Tamtama	1 Orang	3.673.000	
163	Weaving Taruna Matra Darat	1 Orang	26.607.610	
164	Weaving Bintara Umum Matra Darat	1 Orang	6.652.977	
165	Weaving Tamtama Matra Darat Umum	1 Orang	5.009.526	
166	Diktukpa Reg/Sus	1 Orang	3.975.000	
167	Lulusan Diktukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	3.539.000	
168	Lulusan Diktukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	3.586.000	
169	Lulusan Diktukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	3.754.000	
170	Lulusan Diktukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	3.804.000	
171	Lulusan Diktukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	4.003.000	
172	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.642.000	
173	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.683.000	
174	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.690.000	
175	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.719.000	
176	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.727.000	
177	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.271.000	
178	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.285.000	
179	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.324.000	
180	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.344.000	
181	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.387.000	
182	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I	1 Orang	45.803	
183	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II	1 Orang	46.004	
184	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III	1 Orang	47.558	
185	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV	1 Orang	47.851	
186	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V	1 Orang	49.610	
187	Pendidikan Sesioud	1 Orang	5.090.000	
188	Diklapa I/Diklapa II Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.148.000	
189	Diklapa I/Diklapa II Cab Binamin	1 Orang	3.927.000	
190	Peserta Sesioud/Sesko TNI/Lembannas Rayon I	1 Orang	6.143.000	
191	Peserta Sesioud/Sesko TNI/Lembannas Rayon II	1 Orang	6.153.000	
192	Peserta Sesioud/Sesko TNI/Lembannas Rayon III	1 Orang	6.218.000	
193	Peserta Sesioud/Sesko TNI/Lembannas Rayon IV	1 Orang	6.211.000	
194	Peserta Sesioud/Sesko TNI/Lembannas Rayon V	1 Orang	6.202.000	
195	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I	1 Orang	4.104.000	
196	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II	1 Orang	4.064.000	
197	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III	1 Orang	4.188.000	
198	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV	1 Orang	4.242.000	
199	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V	1 Orang	4.270.000	
200	Pelatihan Kepeminipinan Pengawas	1 Orang	96.556	
201	Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur	1 Orang	3.917.000	
202	Dikbangspespa Cab Binamin	1 Orang	3.717.000	
203	Dilcab Perwira Satpur/Banpur	1 Orang	5.256.000	
204	Dilcab Perwira Binamin	1 Orang	5.011.000	
205	Dikbangspespa Rayon I	1 Orang	3.274.000	
206	Dikbangspespa Rayon II	1 Orang	3.322.000	
207	Dikbangspespa Rayon III	1 Orang	3.480.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	208 Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.520.000	
	209 Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.706.000	
	210 Dilajar Bintara Rayon I	1 Orang	3.355.000	
	211 Dilajar Bintara Rayon II	1 Orang	3.414.000	
	212 Dilajar Bintara Rayon III	1 Orang	3.565.000	
	213 Dilajar Bintara Rayon IV	1 Orang	3.615.000	
	214 Dilajar Bintara Rayon V	1 Orang	3.796.000	
	215 Diklatris PNS	1 Orang	53.135	
	216 Dikbangspesba Rayon I	1 Orang	3.143.000	
	217 Dikbangspesba Rayon II	1 Orang	3.190.000	
	218 Dikbangspesba Rayon III	1 Orang	3.323.000	
	219 Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.363.000	
	220 Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.560.000	
	221 Dilajar Tamtama Rayon I	1 Orang	3.213.000	
	222 Dilajar Tamtama Rayon II	1 Orang	3.268.000	
	223 Dilajar Tamtama Rayon III	1 Orang	3.422.000	
	224 Dilajar Tamtama Rayon IV	1 Orang	3.464.000	
	225 Dilajar Tamtama Rayon V	1 Orang	3.647.000	
	226 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I	1 Orang	1.196.000	
	227 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II	1 Orang	1.251.000	
	228 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III	1 Orang	1.256.000	
	229 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV	1 Orang	1.261.000	
	230 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V	1 Orang	1.306.000	
	231 Pendidikan Keahlian Rayon I	1 Orang	3.881.000	
	232 Pendidikan Keahlian Rayon II	1 Orang	3.920.000	
	233 Pendidikan Keahlian Rayon III	1 Orang	4.089.000	
	234 Pendidikan Keahlian Rayon IV	1 Orang	4.142.000	
	235 Pendidikan Keahlian Rayon V	1 Orang	4.339.000	
	236 Pendidikan Komando dan Gulat	1 Orang	5.099.000	
	237 Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus	1 Orang	3.976.000	
	238 Dik Iptek S-1	1 Orang	3.816.000	
	239 Dik Iptek D-3 (Rayon I)	1 Orang	3.204.000	
	240 Dik Iptek D-3 (Rayon II)	1 Orang	3.248.000	
	241 Dik Iptek D-3 (Rayon III)	1 Orang	3.419.000	
	242 Dik Iptek D-3 (Rayon IV)	1 Orang	3.468.000	
	243 Dik Iptek D-3 (Rayon V)	1 Orang	3.667.000	
	244 Dik Iptek SMK (Rayon I)	1 Orang	3.148.000	
	245 Dik Iptek SMK (Rayon II)	1 Orang	3.197.000	
	246 Dik Iptek SMK (Rayon III)	1 Orang	3.363.000	
	247 Dik Iptek SMK (Rayon IV)	1 Orang	3.407.000	
	248 Dik Iptek SMK (Rayon V)	1 Orang	3.596.000	
	249 Dik Iptek D4 Matri Darat	1 Orang	3.746.000	
	250 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I	1 Orang	1.833.000	
	251 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II	1 Orang	1.841.000	
	252 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III	1 Orang	1.872.000	
	253 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV	1 Orang	1.876.000	
	254 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V	1 Orang	1.901.000	
012.23	Markas Besar TNI AL			
	SBK Indeks Biaya Keularan			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Latihan Kematrann	1 Orang	105.000	
	2 Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	204.000	
	3 Latihan Satuan	1 Orang	99.000	
	4 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	856.000	
	5 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	154.000	
	6 Latihan Perorangan Marinir	1 Orang	30.000	
	7 Latihan Teknis Marinir	1 Orang	93.000	
	8 Latihan Taktis Marinir	1 Orang	84.000	
	9 Latihan Perorangan Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	45.000	
	10 Latihan Teknis Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	133.000	
	11 Latihan Taktis Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	204.000	
	12 Latihan Intelijen TNI AL	1 Orang	295.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Layanan Bantuan Hukum Peceorangan			
13	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Orang	9.365.000	
14	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Orang	10.070.000	
15	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Orang	10.545.000	
16	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Orang	9.645.000	
17	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Orang	23.450.000	
18	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Orang	6.242.000	
19	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Orang	6.642.000	
20	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Orang	6.902.000	
21	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Orang	6.357.000	
22	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Orang	13.917.000	
23	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Orang	2.315.000	
24	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Orang	2.480.000	
25	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Orang	2.585.000	
26	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Orang	2.355.000	
27	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Orang	5.700.000	
28	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Orang	9.970.000	
29	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Orang	10.400.000	
30	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Orang	11.000.000	
31	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Orang	10.000.000	
32	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Orang	13.000.000	
	Perkara Hukum Peceorangan			
33	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	82.259.000	
34	Pendapat Dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	938.000	
35	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	6.555.000	
36	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	7.016.000	
37	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	7.348.000	
38	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	6.705.000	
39	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	16.345.000	
40	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.521.000	
41	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.511.000	
42	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	2.950.000	
43	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer	1 Perkara	906.000	
44	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	13.498.000	
45	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	15.392.000	
46	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	16.707.000	
47	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	14.039.000	
48	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	52.727.000	
49	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.621.000	
50	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.548.000	
51	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.370.000	
52	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum	1 Perkara	906.000	
53	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 1	1 Layanan	29.157.000	
54	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 2	1 Layanan	33.280.000	
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 3	1 Layanan	36.227.000	
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 4	1 Layanan	30.499.000	
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 5	1 Layanan	120.478.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1	1 Perkara	8.473.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2	1 Layanan	9.222.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3	1 Layanan	9.758.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4	1 Layanan	8.687.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5	1 Layanan	24.912.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.163.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	15.502.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	16.520.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.127.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. Kadari Rayon 5	1 Layanan	40.091.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	12.004.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	12.807.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	13.396.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	12.379.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Permohonan Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	28.753.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	27.107.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	31.606.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	34.820.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	28.392.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	127.668.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.819.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	11.693.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	13.032.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	10.355.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	51.014.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.856.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	16.945.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	18.498.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	16.034.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	57.116.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	15.058.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	18.057.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	20.200.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	15.915.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	80.734.000	
93	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1	1 Perkara	10.290.000	
94	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2	1 Perkara	10.999.000	
95	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3	1 Perkara	11.818.000	
96	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4	1 Perkara	12.182.000	
97	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5	1 Perkara	43.411.000	
98	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Pringgigit	1 Perkara	906.000	
99	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat	1 Perkara	906.000	
100	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Perkara	8.480.000	
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan				
101	Wersing Calon Taruna/Taruni MAI	1 Orang	25.747.000	
102	Wersing Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.437.000	
103	Wersing Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.661.000	
104	Peserta Dibikpa	1 Orang	3.952.000	
105	Peserta Dibikpa Reguler dan Singkat	1 Orang	3.154.000	
106	Peserta Dibikpa Reguler dan Singkat	1 Orang	3.566.000	
107	Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.810.000	
108	Peserta Seskowi	1 Orang	5.101.000	
109	Seleksi Dit D-3 STTAL	1 Orang	3.752.000	
110	Seleksi Dit S-1 STTAL	1 Orang	3.904.000	
111	Seleksi Dit S-2 STTAL	1 Orang	3.977.000	
112	Peserta Dilopespa	1 Orang	2.771.000	
113	Peserta Dilopesba	1 Orang	2.679.000	
114	Peserta Dit Brevet	1 Orang	4.345.000	
115	Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	6.620.000	
116	Dikma Kopter Pyl	1 Orang	4.918.000	
117	Dikma Kopter Wanita	1 Orang	4.918.000	

65

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	118 Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.667.000	
	119 Dikma Sertar Wanita	1 Orang	6.667.000	
	120 Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	6.952.000	
	121 Dikma Sermadatar Wanita	1 Orang	6.952.000	
	122 Dikma Sermatutar Pria	1 Orang	7.297.000	
	123 Dikma Sermatutar Wanita	1 Orang	7.297.000	
	124 Dikbangsolan Perwira/PA PK Matra Laut	1 Orang	5.520.000	
	125 Dikma Bintara Pria Matra Laut	1 Orang	3.947.000	
	126 Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1 Orang	3.947.000	
	127 Dikbangsolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.707.000	
	128 Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.591.000	
	129 Dikbangsolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.389.000	
	130 Dik Seskoad	1 Orang	5.787.000	
	131 Diklupa Matra Laut	1 Orang	4.082.000	
	132 Diktukpa Matra Laut	1 Orang	3.830.000	
	133 Diktukba Matra Laut	1 Orang	3.639.000	
	134 Dikbangsus Perwira Matra Laut	1 Orang	4.150.000	
	135 Dikbangsus Bintara Matra Laut	1 Orang	3.616.000	
	136 Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.371.000	
	137 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.304.000	
	138 Diksus Penerbang Matra Laut	1 Orang	5.803.000	
	139 Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.694.000	
	140 Dik STTAL D-3	1 Orang	3.572.000	
	141 Dik STTAL S-1	1 Orang	3.936.000	
	142 Dik S-2 STTAL	1 Orang	4.248.000	
012.24	Markas Besar TNI AU			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Peserta Latihan Kematraan	1 Orang	651.000.000	
	2 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	10.353.448.000	
	3 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	957.599.000	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	4 Wersong Taruna/Taruni	1 Orang	27.382.760	
	5 Wersong Bintara Matra Udara	1 Orang	6.845.767	
	6 Wersong Tamtama Matra Udara	1 Orang	4.956.922	
	7 Peserta Soskoad dan Sessau Matra Udara	1 Orang	2.561.700	
	8 Seleksi Sekkoo dan Suspajemen Matra Udara	1 Orang	1.756.200	
	9 Peserta Setulupa Matra Udara	1 Orang	1.567.060	
	10 Peserta Setuluba Matra Udara	1 Orang	1.363.620	
	11 Sertar Pria	1 Orang	75.255.180	
	12 Sertar Wanita	1 Orang	75.255.180	
	13 Pendidikan Sermadatar Pria	1 Orang	78.148.970	
	14 Pendidikan Sermadatar Wanita	1 Orang	78.148.970	
	15 Pendidikan Sermatutar Pria	1 Orang	82.961.360	
	16 Pendidikan Sermatutar Wanita	1 Orang	82.961.360	
	17 Lulusan Dikbangsolan Perwira Matra Udara	1 Orang	5.478.210	
	18 Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	19 Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	20 Lulusan Dikbangsolan Bintara Matra Udara Non ISI	1 Orang	3.304.941	
	21 Lulusan Dikbangsolan Bintara Matra Udara ISD	1 Orang	3.304.941	
	22 Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara	1 Orang	2.943.610	
	23 Lulusan Dikbangsolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.005.358	
	24 Pendidikan Sekbang/Seknar Matra Udara	1 Orang	7.054.322	
	25 Pendidikan Sekbang/Seknar Matra Udara Lanjutan	1 Orang	7.054.322	
	26 Pendidikan SIP/SIN Matra Udara	1 Orang	6.973.188	
	27 Pendidikan Soskoad	1 Orang	5.064.263	
	28 Pendidikan Sessau	1 Orang	4.910.030	
	29 Pendidikan Sekkoo	1 Orang	3.886.550	
	30 Pendidikan Suspajemen	1 Orang	3.847.000	
	31 Pendidikan Setulupa	1 Orang	3.642.843	
	32 Pendidikan Setuluba	1 Orang	3.390.143	
	33 Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	3.612.758	
	34 Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 Orang	3.027.730	
	35 Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.933.208	
	36 Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	813.120	
	37 Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara	1 Orang	699.920	
	38 Koptar Pria	1 Orang	32.029.600	
	39 Koptar Wanita	1 Orang	32.029.600	
	Perkara Hakus Penseorangan			
	40 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Perkara	9.365.000	
	41 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Perkara	10.070.000	
	42 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Perkara	10.545.000	
	43 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Perkara	9.645.000	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
44	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Perkara	23.450.000	
45	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Perkara	6.242.000	
46	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Perkara	6.642.000	
47	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Perkara	6.902.000	
48	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Perkara	6.357.000	
49	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Perkara	13.917.000	
50	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Perkara	2.315.000	
51	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Perkara	2.480.000	
52	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Perkara	2.585.000	
53	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Perkara	2.355.000	
54	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Perkara	5.700.000	
55	Pengurus Tahanan Sementara Rayon 1	1 Perkara	49.850	
56	Pengurus Tahanan Sementara Rayon 2	1 Perkara	52.000	
57	Pengurus Tahanan Sementara Rayon 3	1 Perkara	55.000	
58	Pengurus Tahanan Sementara Rayon 4	1 Perkara	50.000	
59	Pengurus Tahanan Sementara Rayon 5	1 Perkara	65.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	5.795.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	7.016.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	7.348.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	6.705.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	16.345.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.521.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.511.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	2.950.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	13.498.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	15.392.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	16.707.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	14.039.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	76.127.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.621.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.548.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.370.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	29.157.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	33.280.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	36.227.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	30.499.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	120.478.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	8.473.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	9.222.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	9.758.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	8.687.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	24.912.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.163.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.502.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	10.520.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.327.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	40.091.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	12.004.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	12.807.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	13.396.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan [012]

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	12.379.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	28.753.000	
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Perkara	27.107.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	31.606.000	
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	34.820.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	28.392.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	125.418.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	9.819.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	11.693.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.032.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.355.000	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	51.014.000	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	17.156.000	
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.385.000	
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	18.498.000	
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.034.000	
110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	57.116.000	
111	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.058.000	
112	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.067.000	
113	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.200.000	
114	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	15.915.000	
115	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	80.734.000	
116	Pendapat dan Saran Hukum (PSH)	1 Perkara	1.812.000	
117	Bantuan Hukum (Noo Litigasi) Rayon 1	1 Perkara	10.290.000	
118	Bantuan Hukum (Noo Litigasi) Rayon 2	1 Perkara	10.999.000	
119	Bantuan Hukum (Noo Litigasi) Rayon 3	1 Perkara	11.818.000	
120	Bantuan Hukum (Noo Litigasi) Rayon 4	1 Perkara	12.182.000	
121	Bantuan Hukum (Noo Litigasi) Rayon 5	1 Perkara	43.411.000	
Operasi Bidang Pertahanan				
122	Peserta Operasi Intel Taktis TNI	1 Operasi	14.112.002.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (D13)

(dalam rupiah)

Kode	Urutan	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
013.05	Direktorat Jenderal Permsyariahan			
	SDK Total Biaya Keluaran			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1. Peminaan Emudirian Menagidana	20 Orang	38.200.000	
	2. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	10 Orang	32.990.000	
	3. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	10 Orang	36.750.000	
	4. Pelatihan Keterampilan Anak	10 Orang	17.300.000	
	5. Pelatihan Kegiatan Posa-Rehabilitasi	10 Orang	33.900.000	
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Kerja Sama			
	6. Penyusunan Naskah Kerja Sama	1 Kesepakatan	18.892.000	
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM			
	7. Rekomendasi Pengisian Kode Etik	1 Rekomendasi Kebijakan	5.880.000	
	8. Penyelidikan Pengaduan	1 Rekomendasi Kebijakan	10.824.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	9. Pendampingan Peradilan Anak	1 Orang	1.750.000	
	10. Pembimbingan dan Pengawasan	1 Orang	1.875.000	
	11. Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	1 Orang	700.000	
013.06	Direktorat Jenderal Imigrasi			
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Operasi Bidang Keamanan			
	1. Penyediaan Intelijen Keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi	1 Operasi	96.337.000	
	Operasi Bidang Keamanan			
	2. Operasi Mandiri	1 Operasi	96.337.000	
	3. Operasi Gabungan	1 Operasi	87.108.000	
	4. Penyediaan Keimigrasian	1 Operasi	109.720.000	
	Operasi Bidang Keamanan			
	5. Penyediaan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	42.440.000	
	6. Operasi Mandiri di Wilayah	1 Operasi	52.223.000	
	7. Operasi Gabungan di Wilayah	1 Operasi	89.463.000	
	8. Penyediaan Tidak Pelara Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	124.871.000	
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
	9. Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	1 Laporan	18.325.000	
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional			
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
	1. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Orang/Kasus	8.000.000	
	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat			
	2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Kegiatan	10.670.000	
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	SDK Total Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	1. Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang SIPA Bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	270 Orang	2.962.325.000	
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	2. Pendidikan Taruna Tk. I Politeknik Ilmu Perasyarakatan	1 Orang	30.489.000	
	3. Pendidikan Taruna Tk. II Politeknik Ilmu Perasyarakatan	1 Orang	27.570.000	
	4. Pendidikan Taruna Tk. III Politeknik Ilmu Perasyarakatan	1 Orang	27.484.000	
	5. Pendidikan Taruna Tk. IV Politeknik Ilmu Perasyarakatan	1 Orang	28.285.000	
	6. Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Perasyarakatan	1 Orang	11.486.000	
	7. Pendidikan Taruna Tk. I Politeknik Imigrasi	1 Orang	31.393.000	
	8. Pendidikan Taruna Tk. II Politeknik Imigrasi	1 Orang	28.299.500	
	9. Pendidikan Taruna Tk. III Politeknik Imigrasi	1 Orang	27.648.000	
	10. Pendidikan Taruna Tk. IV Politeknik Imigrasi	1 Orang	29.115.000	
	11. Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi	1 Orang	12.301.000	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (DIB)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.02	Inspektoriat Jenderal			
	SBK Total Biaya Kebaruan			
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	1 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyelidikan dan Pengembangan SDM Pertanian	51 Laporan	3.567.828.000	
	2 Laporan Hasil Pengawasan SPP Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyelidikan dan Pengembangan SDM Pertanian	21 Laporan	1.430.596.000	
	3 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyelidikan dan Pengembangan SDM Pertanian	4 Laporan	158.856.000	
	4 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan dan Revisi RKA-KL pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyelidikan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Revisi Laporan Keuangan Kementerian	27 Laporan	938.883.000	
	5 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	50 Laporan	3.572.028.000	
	6 Laporan Hasil Pengawasan SPP Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	18 Laporan	1.090.572.000	
	7 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2 Laporan	78.376.000	
	8 Laporan Hasil Revisi laporan Keuangan dan Revisi RKA-KL pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	16 Laporan	449.612.000	
	9 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	51 Laporan	3.567.828.000	
	10 Laporan Hasil Pengawasan SPP Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	24 Laporan	1.430.596.000	
	11 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	3 Laporan	107.964.000	
	12 Laporan Hasil Revisi laporan Keuangan dan Revisi RKA-KL pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	24 Laporan	820.038.000	
	13 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Inspektoriat Jenderal, Direktorat Perernakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	51 Laporan	3.548.928.000	
	14 Laporan Hasil Pengawasan SPP Lingkup Inspektoriat Jenderal, Direktorat Perernakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	24 Laporan	1.440.096.000	
	15 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Inspektoriat Jenderal, Direktorat Perernakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	3 Laporan	88.764.000	
	16 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan dan Revisi RKA-KL pada Satker Lingkup Inspektoriat Jenderal, Direktorat Perernakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	24 Laporan	438.120.000	
	17 Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	59 Laporan	4.221.000.000	
018.08	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup			
	1 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur	1 Unit	165.000.000	
	2 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur	1 Unit	128.000.000	
	3 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Timur	1 Unit	105.000.000	
	4 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah	1 Unit	140.000.000	
	5 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah	1 Unit	105.000.000	
	6 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Tengah	1 Unit	85.000.000	
	7 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	1 Unit	127.000.000	
	8 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat	1 Unit	95.000.000	
	9 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Barat	1 Unit	76.000.000	
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	1 Rekomendasi Kebijakan Pertanian Mekanisasi	2 Rekomendasi	273.840.000	
	Penelitian dan Pengembangan Produk			
	2 Mikrobiologi Veteriner Terkonsentrasi dan Terkonsentrasi	100 Jenis	247.040.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
018.12	Badan Karantina Pertanian SBK Indeks Biaya Rebasar Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 1 Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keselamatan Hayati (SBK Uji Terap)	1 Uji Terap	181.402.000	

8/13

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
022.02	Inspektorat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	1. Laporan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Mutu/ritas Penyelenggaraan SPP Kementerian Perhubungan	1 Dokumen	440.823.000	
	2. Laporan Hasil Restu Rencana Kebutuhan BMN	1 Dokumen	291.519.000	
	3. Laporan Hasil Restu Laporan Keuangan	2 Dokumen	1.229.340.000	
	4. Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tingkat Eselon I Kementerian Perhubungan	1 Dokumen	372.174.000	
	5. Laporan Survey Kepuasan Pengawasan	1 Dokumen	502.199.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukar	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
023.18	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecekapan Kerja	1 Orang	4.383.381	
	2 Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecekapan Wirasaha	1 Orang	6.257.276	

RS

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
024-05	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	SBK Indeks Biaya Kesehatan			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	1 IRS/Ancoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada Dinding Rumah)	1 Layanan	26.300.000	
	2 IRS/Ancoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada Dinding Rumah) Daerah Suli Kategori I (Daerah Suli selain Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	36.300.000	
	3 IRS/Ancoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada Dinding Rumah) Daerah Suli Kategori II (Daerah Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	43.000.000	
	4 Survei Darah Masak Malaria (Angka Parasite Rate)	1 Layanan	10.900.000	
	5 Survei Darah Masak Malaria (Angka Parasite Rate) di Daerah Suli	1 Layanan	19.350.000	
	6 Survei Evaluasi Prevalensi Mikroflora Pasca PCBM (Pre TASI)	1 Layanan	43.320.000	
	7 Survei Evaluasi Prevalensi Abangflora Pasca PCBM (Pre TASI) di Daerah Suli	1 Layanan	72.630.000	
	8 Penyemprotan Fokus Kandang Celétozoosis	1 Layanan	30.375.000	
	9 Survei Sentinel' malaria Knowledge	1 Layanan	9.100.000	
	Pelayanan Publik Lainnya			
	10 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	1 Layanan	600.000	
	11 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Utara	1 Layanan	600.000	
	12 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di PLBH	1 Layanan	800.000	
	13 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada situasi khusus	1 Layanan	1.455.000	
	14 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Utama Seelcarro Halia Terminal Internasional	1 Layanan	2.200.000	
	15 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori I)	1 Layanan	945.000	
	16 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	1 Layanan	1.061.000	
	17 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pw	1 Layanan	2.573.000	
	18 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	1 Layanan	433.000	
	19 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Malaria	1 Layanan	1.227.000	
	20 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	1 Layanan	320.000	
	21 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	1 Layanan	1.673.000	
	22 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	1 Layanan	320.000	
	23 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS	1 Layanan	3.025.000	
	24 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	1 Layanan	4.555.000	
	25 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II)	1 Layanan	800.000	
	26 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	1 Layanan	400.000	
	27 Layanan Pemantauan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	1 Layanan	870.000	
	28 Layanan Pemantauan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Kategori 2	1 Layanan	1.920.000	
	Pelayanan Publik Lainnya			
	29 Layanan Kewaspadaan Diri Berbasis Laboratorium	1 Layanan	38.900.000	

8/3

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uku	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	Inspektorat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran Layanan Audit Internal 1 Layanan Audit Internal	1 Dokumen	67.258.000	

65

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial [027]

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial			
	SBK Indeks Biaya Keuaran			
	Akreditasi Lembaga			
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi	1 Orang	3.965.620	
	Sertifikasi Profesi dan SDM			
2	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Yang Mengikuti Proses Sertifikasi	1 Orang	2.129.586	
	Pelatihan Bidang Sosial			
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (210 JP /25 Hari)	1 Orang	17.009.433	
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (120 JP /15 Hari)	1 Orang	11.388.233	
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (100 JP /12 Hari)	1 Orang	10.103.866	
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (80 JP /10 Hari)	1 Orang	9.318.200	
7	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (60 JP /7 Hari)	1 Orang	7.724.066	
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (210 JP /25 Hari)	1 Orang	23.040.500	
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (120 JP /15 Hari)	1 Orang	14.226.666	
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (100 JP /12 Hari)	1 Orang	12.911.000	
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (80 JP /10 Hari)	1 Orang	12.420.333	
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (60 JP /7 Hari)	1 Orang	10.690.166	
13	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (210 JP /25 Hari)	1 Orang	15.549.866	
14	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (120 JP /15 Hari)	1 Orang	9.704.733	
15	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (100 JP /12 Hari)	1 Orang	8.850.400	
16	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (80 JP /10 Hari)	1 Orang	8.144.066	
17	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (60 JP /7 Hari)	1 Orang	7.204.400	
18	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (210 JP/25 Hari)	1 Orang	18.767.300	
19	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (120 JP/14 Hari)	1 Orang	12.916.366	
20	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (100 JP/12 Hari)	1 Orang	11.805.533	
21	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (80 JP/10 Hari)	1 Orang	11.020.533	
22	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (60 JP/7 Hari)	1 Orang	9.544.266	
23	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (210 JP /25 Hari)	1 Orang	18.079.666	
24	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (120 JP /15 Hari)	1 Orang	11.520.866	
25	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pekso) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (100 JP /12 Hari)	1 Orang	10.325.533	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	26 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pelase) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (80 JP / 30 Hari)	1 Orang	9.484.200	
	27 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pelase) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (60 JP / 7 Hari)	1 Orang	7.885.733	
	28 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pelase) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (210 JP/25 Hari)	1 Orang	28.882.866	
	29 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pelase) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (120 JP /15 Hari)	1 Orang	30.296.866	
	30 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pelase) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (100 JP /12 Hari)	1 Orang	19.263.533	
	31 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pelase) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (80 JP /10 Hari)	1 Orang	18.464.200	
	32 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Pelase) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (60 JP /7 Hari)	1 Orang	15.553.266	
	Pendidikan Tinggi			
	33 Mahasiswa Prodi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	4.478.314	
	34 Mahasiswa Prodi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	20.651.862	
	35 Mahasiswa Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	22.458.612	
	36 Mahasiswa Prodi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	1 Orang	29.589.460	

05

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.04	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Bantuan Peralatan/Sarana			
	1 Bibit Rumpuk Laut Yang Didistribusikan ke Masyarakat	1 Unit	31.820	
	Bantuan Hewan			
	2 Calon induk Unggul Ikan Air Tawar Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	34.432	
	3 Calon induk Unggul Udang Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	52.446	
	4 Calon induk Unggul Ikan Air Payau Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	97.400	
	5 Calon induk Unggul Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	149.450	
	6 Calon induk Unggul Ikan Laut Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	316.000	
	7 Benih Ikan Air Tawar Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	317	
	8 Bantuan Benih Udang Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	48	
	9 Bantuan Benih Ikan Air Payau Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	234	
	10 Bantuan Benih Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	652	
	11 Bantuan Benih Ikan Laut Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Ekor	5.360	
	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			
	12 Sampel Residu Layanan UPT	1 Sampel	931.755	
	13 Sampel Kualitas Air Layanan UPT	1 Sampel	197.570	
	14 Sampel Patologi Layanan UPT	1 Sampel	560.914	
	15 Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	1 Sampel	520.565	
	16 Sampel Biologi Molekuler Layanan UPT	1 Sampel	932.265	
	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			
	17 Sampel Nutrisi Pakan	1 Sampel	503.945	
	18 Sampel Obat Ikan	1 Sampel	607.566	
	Bantuan Peralatan/Sarana			
	19 Pakan Ikan Yang Disalurkan ke Masyarakat	1 Kg	13.844	
032.05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Penanganan Perkara			
	1 Perkara TPKP Mudah Yang Ditangani	1 Perkara	76.434.000	
	2 Perkara TPKP Sedang Yang Ditangani	1 Perkara	85.378.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
	SBK Total Biaya Kelembaan			
	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan			
	1. Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tertentu di Wilayah I	28 Lembaga	1.048.526.000	
	2. Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tertentu di Wilayah II	29 Lembaga	1.089.514.000	
	3. Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tertentu di Wilayah III	29 Lembaga	1.361.930.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan	Desaran	Keterangan
1	2	3	4	5
054.01	Badan Pusat Statistik			
	SDK Total Biaya Keluaran			
	Data dan Informasi Publik			
	1. Publikasi/Laporan Indeks Pembangunan Manusia	1 Publikasi/laporan	302.485.000	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	2. Layanan Pengawasan Internal Inspektori Wilayah I	36 Layanan	1.325.979.000	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	3. Layanan Pengawasan Internal Inspektori Wilayah II	36 Layanan	1.210.378.000	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	4. Layanan Pengawasan Internal Inspektori Wilayah III	36 Layanan	1.252.486.000	
	SDK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	5. Inklat Teknis Substansi	1 Layanan	8.416.000	
	6. Inklat Pungutan	1 Layanan	17.635.000	
	7. Standardisasi dan Sertifikasi	1 Layanan	6.992.441	
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	8. Program D III	1 Layanan	4.430.968	
	9. Program D IV	1 Layanan	3.819.256	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
056.01	Sekretariat Jenderal			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Prasarana Pengembangan Kawasan			
	1. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori I	1 Bidang	78.585	
	2. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori II	1 Bidang	68.467	
	3. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori III	1 Bidang	59.735	
	4. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori IV	1 Bidang	50.785	
	5. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori V	1 Bidang	41.835	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
	6. PBT PTSL ASN Kategori I	1 Bidang	214.600	
	7. PBT PTSL ASN Kategori II	1 Bidang	182.700	
	8. PBT PTSL ASN Kategori III	1 Bidang	151.800	
	9. PBT PTSL ASN Kategori IV	1 Bidang	118.200	
	10. PBT PTSL ASN Kategori V	1 Bidang	88.800	
	11. PBT PTSL ASN Kategori VI	1 Bidang	231.500	
	12. PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	1 Bidang	214.600	
	13. PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	1 Bidang	182.700	
	14. PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	1 Bidang	151.800	
	15. PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	1 Bidang	118.200	
	16. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	1 Bidang	88.800	
	17. PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	1 Bidang	231.500	
	18. PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	1 Bidang	473.600	
	19. PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	1 Bidang	402.800	
	20. PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	1 Bidang	334.100	
	21. PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	1 Bidang	259.400	
	22. PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	1 Bidang	195.100	
	23. PBT K4 PTSL ASN Kategori 1	1 Bidang	201.800	
	24. PBT K4 PTSL ASN Kategori 2	1 Bidang	171.100	
	25. PBT K4 PTSL ASN Kategori 3	1 Bidang	141.300	
	26. PBT K4 PTSL ASN Kategori 4	1 Bidang	109.000	
	27. PBT K4 PTSL ASN Kategori 5	1 Bidang	80.900	
	28. PBT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	422.000	
	29. PBT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	357.100	
	30. PBT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	294.200	
	31. PBT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	225.700	
	32. PBT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	159.000	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
	33. PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	1.173.000	
	34. PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	998.000	
	35. PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	828.000	
	36. PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	643.000	
	37. PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	463.000	
	38. PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	2.273.000	
	39. PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	1.923.000	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
40	PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	1.583.000	
41	PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	1.213.000	
42	PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	926.000	
43	PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	6.206.000	
44	PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	5.331.000	
45	PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	4.481.000	
46	PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	3.556.000	
47	PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	2.656.000	
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat				
48	SHAT PTSL ASN Kategori 1	1 Orang	257.000	
49	SHAT PTSL ASN Kategori 2	1 Orang	224.000	
50	SHAT PTSL ASN Kategori 3	1 Orang	192.000	
51	SHAT PTSL ASN Kategori 4	1 Orang	157.000	
52	SHAT PTSL ASN Kategori 5	1 Orang	124.000	
53	SHAT PTSL ASN Kategori 6	1 Orang	355.000	
54	SHAT Non Sistematis Kategori 1	1 Orang	290.000	
55	SHAT Non Sistematis Kategori 2	1 Orang	251.000	
56	SHAT Non Sistematis Kategori 3	1 Orang	214.000	
57	SHAT Non Sistematis Kategori 4	1 Orang	173.000	
58	SHAT Non Sistematis Kategori 5	1 Orang	140.000	
59	SHAT Redistribusi Tanah	1 Orang	13.000	
60	SHAT Konsolidasi Tanah	1 Orang	13.000	
Pelayanan Publik Kepada Lembaga				
61	SHAT BMN (<= 25.000 M2) Kategori 1	1 Lembaga	874.000	
62	SHAT BMN (<= 25.000 M2) Kategori 2	1 Lembaga	734.000	
63	SHAT BMN (<= 25.000 M2) Kategori 3	1 Lembaga	598.000	
64	SHAT BMN (<= 25.000 M2) Kategori 4	1 Lembaga	450.000	
65	SHAT BMN (<= 25.000 M2) Kategori 5	1 Lembaga	306.000	
66	SHAT BMN (25.000 s.d. 100.000 M2) Kategori 1	1 Lembaga	1.792.000	
67	SHAT BMN (25.000 s.d. 100.000 M2) Kategori 2	1 Lembaga	1.494.000	
68	SHAT BMN (25.000 s.d. 100.000 M2) Kategori 3	1 Lembaga	1.205.000	
69	SHAT BMN (25.000 s.d. 100.000 M2) Kategori 4	1 Lembaga	891.000	
70	SHAT BMN (25.000 s.d. 100.000 M2) Kategori 5	1 Lembaga	585.000	
71	SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 1	1 Lembaga	3.730.000	
72	SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 2	1 Lembaga	3.100.000	
73	SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 3	1 Lembaga	2.488.000	
74	SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 4	1 Lembaga	1.822.000	
75	SHAT BMN di Atas 100.000 M2 kategori 5	1 Lembaga	1.174.000	
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat				
76	SK Redistribusi Tanah Kategori I	1 Bidang	314.000	
77	SK Redistribusi Tanah Kategori II	1 Bidang	277.000	
78	SK Redistribusi Tanah Kategori III	1 Bidang	246.000	
79	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	1 Bidang	207.000	
80	SK Redistribusi Tanah Kategori V	1 Bidang	169.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
81	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	1 Bidang	445.000	
	Prasarana Pengembangan Kawasan			
82	Data dan Informasi P4T Kategori I	1 Bidang	118.000	
83	Data dan Informasi P4T Kategori II	1 Bidang	106.000	
84	Data dan Informasi P4T Kategori III	1 Bidang	97.000	
85	Data dan Informasi P4T Kategori IV	1 Bidang	87.000	
86	Data dan Informasi P4T Kategori V	1 Bidang	84.000	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
87	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I (Bidang)	1 Bidang	529.780	
88	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II (Bidang)	1 Bidang	457.480	
89	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III (Bidang)	1 Bidang	423.120	
90	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV (Bidang)	1 Bidang	380.460	
91	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V (Bidang)	1 Bidang	353.500	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
92	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I (Materi Teknis)	1 Lembaga	129.551.000	
93	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II (Materi Teknis)	1 Lembaga	118.487.000	
94	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III (Materi Teknis)	1 Lembaga	115.818.000	
95	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV (Materi Teknis)	1 Lembaga	113.893.000	
96	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V (Materi Teknis)	1 Lembaga	117.959.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
057.01	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Sarana Bidang Pendidikan			
	1. Bahan Perpustakaan Yang Dijilid	6.000 Paket	1.285.800.000	
	2. Arah Media Bahan Pustaka dan Naskah Kuno dalam bentuk CD dan File Akses	6.000 Paket	511.540.000	
	3. Restorasi Karya Bekas Koleksi Perpustakaan	6.000 Paket	706.490.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	1. Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	2. Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	63.046.000	
	3. Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000	
	4. Balmon Kelas I Jakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.340.000	
	5. Balmon Kelas I Jakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	44.970.000	
	6. Balmon Kelas I Jakarta - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	7. Balmon Kelas I Jakarta - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000	
	8. Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	9. Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Koordinasi Hasil Gangguan)	1 Layanan	10.230.000	
	10. Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000	
	11. Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.876.000	
	12. Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.445.000	
	13. Balmon Kelas I Medan - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	9.150.000	
	14. Balmon Kelas I Medan - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	36.335.000	
	15. Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.415.000	
	16. Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	36.585.000	
	17. Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.914.000	
	18. Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	36.585.000	
	19. Balmon Kelas I Medan - Layanan Penyelidikan Penanganan Gangguan Dalam Kota	1 Layanan	4.880.000	
	20. Balmon Kelas I Medan - Layanan Penyelidikan Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	23.145.000	
	21. Balmon Kelas I Bandung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
	22. Balmon Kelas I Bandung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.750.000	
	23. Balmon Kelas I Bandung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	12.300.000	
	24. Balmon Kelas I Bandung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	45.350.000	
	25. Balmon Kelas I Bandung - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.325.000	
	26. Balmon Kelas I Bandung - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.750.000	
	27. Balmon Kelas I Bandung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.325.000	
	28. Balmon Kelas I Bandung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.560.000	
	29. Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
	30. Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.050.000	
	31. Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Laut (Karamunjawa))	1 Layanan	28.100.000	
	32. Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.410.000	
	33. Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	49.010.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
34	Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	57.710.000	
35	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
36	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.050.000	
37	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	28.100.000	
38	Balmon Kelas I Semarang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
39	Balmon Kelas I Semarang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.050.000	
40	Balmon Kelas I Surabaya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.195.000	
41	Balmon Kelas I Surabaya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	24.015.000	
42	Balmon Kelas I Surabaya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.810.000	
43	Balmon Kelas I Surabaya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	87.400.000	
44	Balmon Kelas I Surabaya - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.195.000	
45	Balmon Kelas I Surabaya - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.110.000	
46	Balmon Kelas I Surabaya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.625.000	
47	Balmon Kelas I Surabaya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.075.000	
48	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	5.332.000	
49	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.371.000	
50	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.750.000	
51	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.371.000	
52	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.940.000	
53	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	62.592.000	
54	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	67.930.000	
55	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.332.000	
56	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.371.000	
57	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat dan Laut	1 Layanan	25.371.000	
58	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.000.000	
59	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.430.000	
60	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Darat	1 Layanan	24.371.000	
61	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.000.000	
62	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.371.000	
63	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.420.000	
64	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	27.275.000	
65	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.575.000	
66	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	18.050.000	
67	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	74.045.000	
68	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	25.325.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
69	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.575.000	
70	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.420.000	
71	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	79.515.000	
72	Balmon Kelas I Makassar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.575.000	
73	Balmon Kelas I Makassar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.575.000	
74	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	5.290.000	
75	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.925.000	
76	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	22.650.000	
77	Balai Monitor Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	60.325.000	
78	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Transportasi Darat	1 Layanan	21.925.000	
79	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	84.325.000	
80	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.925.000	
81	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Dalam Kota	1 Layanan	4.900.000	
82	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.925.000	
83	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.290.000	
84	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.830.000	
85	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.925.000	
86	Balmon Kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.746.000	
87	Balmon kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.925.000	
88	Balmon Kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Lewat Sungai/Laut	1 Layanan	21.175.000	
89	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penertiban Frekuensi Radio dan Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.340.000	
90	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	61.980.000	
91	Balai Monitor Kelas I Palembang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000	
92	Balai Monitor Kelas I Palembang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.575.000	
93	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000	
94	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	20.925.000	
95	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	4.808.000	
96	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	11.361.000	
97	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	18.333.000	
98	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (DIY)	1 Layanan	37.723.000	
99	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pengukuran Frekuensi Radio (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	13.514.000	
100	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I	1 Layanan	15.100.000	
101	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.825.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Usaian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
102	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.075.000	
103	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.850.000	
104	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	67.468.000	
105	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.075.000	
106	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.950.000	
107	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.825.000	
108	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.750.000	
109	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	7.270.000	
110	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	26.950.000	
111	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	44.410.000	
112	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	24.450.000	
113	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	36.460.000	
114	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	56.770.000	
115	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.475.000	
116	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.750.000	
117	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	44.610.000	
118	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.500.000	
119	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.750.000	
120	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	44.610.000	
121	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.031.000	
122	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Darat	1 Layanan	21.906.000	
123	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Udara Kepulauan	1 Layanan	30.666.000	
124	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Laut Kepulauan	1 Layanan	25.166.000	
125	Balai Monitor Kelas I Manado - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	17.706.000	
126	Balai Monitor Kelas I Manado - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut	1 Layanan	67.206.000	
127	Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.406.000	
128	Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulut Transportasi Darat	1 Layanan	21.906.000	
129	Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulut	1 Layanan	30.666.000	
130	Balai Monitor Kelas I Manado - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Sulawesi Utara	1 Layanan	21.937.000	
131	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	8.040.000	
132	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	33.370.000	
133	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	67.306.000	

65

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
134	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	67.199.000	
135	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	22.520.000	
136	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Papua)	1 Layanan	182.170.000	
137	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	8.840.000	
138	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota (Papua)	1 Layanan	39.306.000	
139	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Dengan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	40.071.000	
140	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.925.000	
141	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	57.732.000	
142	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.483.000	
143	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Diluar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.335.000	
144	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Menggunakan Transportasi	1 Layanan	22.938.000	
145	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	25.625.000	
146	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	55.233.000	
147	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.483.000	
148	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.293.000	
149	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh) Dengan Menggunakan Transportasi Laut	1 Layanan	22.725.000	
150	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Didalam Kota	1 Layanan	4.483.000	
151	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.953.000	
152	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.000.000	
153	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.638.000	
154	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	37.523.000	
155	Balai Monitor Kelas II Batam - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	28.620.000	
156	Balai Monitor Kelas II Batam - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	66.527.000	
157	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
158	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.948.000	
159	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	37.873.000	
160	Balai Monitor Kelas II Batam - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.320.000	
161	Balai Monitor Kelas II Batam - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.598.000	
162	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.585.000	
163	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.070.000	
164	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Layanan	47.600.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
165	Balai Monitor Kelas II Padang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	12.555.000	
166	Balai Monitor Kelas II Padang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	41.710.000	
167	Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.973.000	
168	Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.725.000	
169	Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	1 Layanan	47.600.000	
170	Balai Monitor Kelas II Padang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.600.000	
171	Balai Monitor Kelas II Padang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.725.000	
172	Balai Monitor Kelas II Jambi - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.630.000	
173	Balai Monitor Kelas II Jambi - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.650.000	
174	Balai Monitor Kelas II Jambi - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	14.750.000	
175	Balai Monitor Kelas II Jambi - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	43.150.000	
176	Balai Monitor Kelas II Jambi - Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	23.500.000	
177	Balai Monitor Kelas II Jambi - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	21.250.000	
178	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
179	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.475.000	
180	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu	1 Layanan	24.685.000	
181	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	13.600.000	
182	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	42.380.000	
183	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
184	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.825.000	
185	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.650.000	
186	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.941.000	
187	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
188	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
189	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.050.000	
190	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	28.226.000	
191	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.150.000	
192	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
193	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.150.000	
194	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	17.680.000	
195	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
196	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
197	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
198	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.495.000	
199	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	62.265.000	
200	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	54.488.000	
201	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.402.000	
202	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
203	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
204	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
205	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.660.000	
206	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
207	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.425.000	
208	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	14.075.000	
209	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	40.870.000	
210	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	22.425.000	
211	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
212	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.425.000	
213	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.460.000	
214	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.000.000	
215	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.200.000	
216	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	45.366.000	
217	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.300.000	
218	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.680.000	
219	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.200.000	
220	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.580.000	
221	Balai Monitoring Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.006.000	
222	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	22.947.000	
223	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Penyebrangan Air/Laut	1 Layanan	24.338.000	
224	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Laut di Gil/Kepulauan	1 Layanan	15.059.000	
225	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	38.069.000	
226	Balmon Kelas II Mataram - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.640.000	
227	Balmon Kelas II Mataram - Penerbitan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	58.762.000	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
228	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	84.982.000	
229	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.197.000	
230	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	22.947.000	
231	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Penyelbrangan Air/Laut	1 Layanan	24.338.000	
232	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	15.059.000	
233	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.197.000	
234	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB)	1 Layanan	24.338.000	
235	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	38.060.000	
236	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.647.000	
237	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.632.000	
238	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	30.532.000	
239	Balmon Kelas II Palu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	71.631.000	
240	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.432.000	
241	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.632.000	
242	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	30.532.000	
243	Balmon Kelas II Palu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.728.000	
244	Balmon Kelas II Palu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.975.000	
245	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.000.000	
246	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	22.750.000	
247	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.350.000	
248	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	36.330.000	
249	Lokmon Kendari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	33.050.000	
250	Lokmon Kendari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	50.630.000	
251	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.250.000	
252	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	22.750.000	
253	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.000.000	
254	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.330.000	
255	Lokmon Kendari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.250.000	
256	Lokmon Kendari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.750.000	
257	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.781.000	
258	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Yahukimo, Mappi dan Asmat)	1 Layanan	55.161.000	
259	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bovenigo, Aski dan Muting)	1 Layanan	43.161.000	
260	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Tanah Miring, Kuring, Jagobob, SeMangga, Noankojerai, Sotni)	1 Layanan	26.855.000	
261	Balmon Kelas II Merauke - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	40.472.000	
262	Balmon Kelas II Merauke - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	123.181.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
263	Balloon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.010.000	
264	Balloon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Vahukuho, Mappi dan Amasi)	1 Layanan	53.745.000	
265	Balloon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bovendigo, Asiki dan Muring)	1 Layanan	43.145.000	
266	Balloon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Tanah Miring, Kuring, Jagobob, SeMangga, Nounkejerai, Sota)	1 Layanan	26.839.000	
267	Balloon Kelas II Merauke - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.570.000	
268	Balloon Kelas II Merauke - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	51.901.000	
269	Layanan Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.530.000	
270	Layanan Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	36.837.000	
271	Layanan Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	51.657.000	
272	Layanan Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	48.657.000	
273	Layanan Manokwari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.390.000	
274	Layanan Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.530.000	
275	Layanan Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi laut	1 Layanan	48.657.000	
276	Layanan Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	36.837.000	
277	Layanan Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	51.657.000	
278	Layanan Manokwari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.100.000	
279	Layanan Manokwari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	52.120.000	
280	Layanan Mamuju - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.375.000	
281	Layanan Mamuju - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
282	Layanan Mamuju - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	23.503.000	
283	Layanan Mamuju - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	63.880.000	
284	Layanan Mamuju - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.375.000	
285	Layanan Mamuju - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
286	Layanan Mamuju - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.375.000	
287	Layanan Mamuju - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
288	Layanan Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.595.000	
289	Layanan Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi laut	1 Layanan	26.464.000	
290	Layanan Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	23.945.000	
291	Layanan Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.536.000	
292	Layanan Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	28.669.000	
293	Layanan Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	40.974.000	
294	Layanan Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.517.000	
295	Layanan Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	13.320.000	
296	Layanan Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	23.670.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Usulan	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
297	Lokmon Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.400.000	
298	Lokmon Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	18.594.000	
299	Lokmon Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	25.796.000	
300	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.610.000	
301	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.100.000	
302	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.950.000	
303	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Pulau Terluar	1 Layanan	44.750.000	
304	Lokmon Ternate - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	25.590.000	
305	Lokmon Ternate - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	63.592.000	
306	Lokmon Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.130.000	
307	Lokmon Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.800.000	
308	Lokmon Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.950.000	
309	Lokmon Ternate - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.122.000	
310	Lokmon Ternate - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.620.000	
311	Lokmon Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
312	Lokmon Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	18.350.000	
313	Lokmon Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.790.000	
314	Lokmon Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
315	Lokmon Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	18.350.000	
316	Lokmon Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.790.000	
317	Lokmon Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	8.290.000	
318	Lokmon Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	22.308.000	
319	Lokmon Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.790.000	
320	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.290.000	
321	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	18.350.000	
322	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut	1 Layanan	25.790.000	
323	Lokmon Gorontalo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
324	Lokmon Gorontalo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.850.000	
325	Lokmon Gorontalo - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.435.000	
326	Lokmon Gorontalo - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	63.885.000	
327	Loka Gorontalo - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
328	Loka Gorontalo - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.850.000	
329	Lokmon Gorontalo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
330	Lokmon Gorontalo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.850.000	
331	Blanon Kelas I Tenngrang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.750.000	

RS

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
332	Balmon Kelas I Tangerang - Penastasan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	10.600.000	
333	Balmon Kelas I Tangerang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Kota Tangerang, Tangerang Selatan)	1 Layanan	14.676.000	
334	Balmon Kelas I Tangerang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	58.878.000	
335	Balmon Kelas I Tangerang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.300.000	
336	Balmon Kelas I Tangerang - Pengukuran Frekuensi Dalam Kota (Kota Tangerang, Tangerang Selatan)	1 Layanan	4.950.000	
337	Balmon Kelas I Tangerang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.950.000	
338	Balmon Kelas I Tangerang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.800.000	
339	Lokmen Tanjung Selor - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
340	Lokmen Tanjung Selor - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.350.000	
341	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.900.000	
342	Lokmen Tanjung Selor - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.380.000	
343	Lokmen Tanjung Selor Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	63.450.000	
344	Lokmen Tanjung Selor - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
345	Lokmen Tanjung Selor - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Darat	1 Layanan	24.350.000	
346	Lokmen Tanjung Selor - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Laut	1 Layanan	28.900.000	
347	Lokmen Tanjung Selor - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
348	Lokmen Tanjung Selor - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	30.300.000	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Perkara Hukum Badan Usaha			
	1 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di DKI Jakarta	1 Perkara	79.442.000	
	2 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandung	1 Perkara	100.998.000	
	3 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Taikmalaya	1 Perkara	89.186.000	
	4 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Bogor	1 Perkara	89.186.000	
	5 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Semarang	1 Perkara	94.996.000	
	6 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Barrumama	1 Perkara	85.007.000	
	7 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	1 Perkara	85.007.000	
	8 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Yogyakarta	1 Perkara	100.721.000	
	9 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Surabaya	1 Perkara	102.032.000	
	10 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Kediri	1 Perkara	90.913.000	
	11 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Jember	1 Perkara	90.913.000	
	12 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	1 Perkara	97.576.000	
	13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Tenggara	1 Perkara	86.958.000	
	14 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Selatan	1 Perkara	86.958.000	
	15 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Medan	1 Perkara	94.111.000	
	16 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Toba Samosir	1 Perkara	86.223.000	
	17 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungbalai	1 Perkara	82.907.000	
	18 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Padang	1 Perkara	98.887.000	
	19 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Parakumbuh	1 Perkara	87.139.000	
	20 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Dharmasraya	1 Perkara	87.139.000	
	21 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	1 Perkara	100.613.000	
	22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Dumai	1 Perkara	88.429.000	
	23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Indragiri Hilir	1 Perkara	88.429.000	
	24 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jambi	1 Perkara	95.006.000	
	25 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Sungai Penuh	1 Perkara	84.367.000	
	26 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palembang	1 Perkara	95.327.000	
	27 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Lubaklinggau	1 Perkara	84.581.000	
	28 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandar Lampung	1 Perkara	90.423.000	
	29 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1 Perkara	81.777.000	
	30 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	1 Perkara	101.125.000	
	31 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Senayan	1 Perkara	88.109.000	
	32 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palangka Raya	1 Perkara	98.599.000	
	33 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Perkara	88.738.000	
	34 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banjarmasin	1 Perkara	93.131.000	
	35 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Perkara	82.981.000	
	36 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu	1 Perkara	82.981.000	
	37 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Samarinda	1 Perkara	139.077.000	
	38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Balikpapan	1 Perkara	116.881.000	
	39 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan	1 Perkara	116.881.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
40	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Manado	1 Perkara	95.604.000	
41	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Perkara	84.421.000	
42	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Balai POM Palu	1 Perkara	97.224.000	
43	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Banggai	1 Perkara	85.636.000	
44	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Makassar	1 Perkara	99.663.000	
45	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Palopo	1 Perkara	87.456.000	
46	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Kendari	1 Perkara	100.648.000	
47	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Baubau	1 Perkara	88.450.000	
48	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Ambon	1 Perkara	174.783.000	
49	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Perkara	133.084.000	
50	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Denpasar	1 Perkara	107.581.000	
51	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Buleleng	1 Perkara	94.438.000	
52	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Mataram	1 Perkara	103.564.000	
53	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Bima	1 Perkara	91.369.000	
54	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Kupang	1 Perkara	104.080.000	
55	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Ende	1 Perkara	89.465.000	
56	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Manggarai Barat	1 Perkara	89.465.000	
57	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jayapura	1 Perkara	191.718.000	
58	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Merauke	1 Perkara	171.991.000	
59	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Mimika	1 Perkara	158.884.000	
60	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Bengkulu	1 Perkara	93.290.000	
61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka Rejang Lebong	1 Perkara	82.267.000	
62	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Sofifi	1 Perkara	105.613.000	
63	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupate Pulau Marota	1 Perkara	91.477.000	
64	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Serang	1 Perkara	101.424.000	
65	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Tangerang	1 Perkara	86.031.000	
66	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Pangkal Pinang	1 Perkara	99.100.000	
67	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	1 Perkara	87.384.000	
68	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Gorontalo	1 Perkara	98.154.000	
69	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Batang	1 Perkara	123.726.000	
70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	1 Perkara	104.569.000	
71	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Manokwari	1 Perkara	178.180.000	
72	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	1 Perkara	150.441.000	
73	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Mamuju	1 Perkara	92.885.000	
	Pemantauan Produk			
74	Rekomendasi Inteljen Yang Berkualitas	1 Dokumen	67.960.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	Badan Narkotika Nasional			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
1	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	64.055.500	
2	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	23.199.775	
3	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	13.286.340	
4	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	32.542.000	
5	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	17.967.928	
6	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	12.462.200	
7	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Rehabilitasi BNN Badak	1 Orang	37.580.600	
8	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Rehabilitasi BNN Badak	1 Orang	22.011.300	
9	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Balai Rehabilitasi BNN Badak	1 Orang	11.430.114	
10	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	28.462.714	
11	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	14.758.875	
12	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	7.961.230	
13	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalimantan	1 Orang	22.409.000	
14	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalimantan	1 Orang	13.197.393	
15	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalimantan	1 Orang	6.696.590	
16	Program Rehabilitasi 12 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	27.757.000	
17	Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	15.599.625	
18	Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba MIHK BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	7.951.625	
19	Penyidikan dan Pengujian Produk			
	Layanan Pemeriksaan Uji Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Orang	254.000	

8/5

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
	SRK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Sosial			
	1 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.032.000	
	2 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.557.766	
	3 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.766.400	
	4 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Besar Yogyakarta	1 Orang	4.201.333	
	5 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.195.933	
	6 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Uluwu	1 Orang	5.493.000	
	7 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Makassar	1 Orang	3.878.333	
	8 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.806.333	
	9 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.370.566	
	10 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Banjarmasin	1 Orang	4.238.400	
	11 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	6.801.133	
	12 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	7.197.933	
	13 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.942.500	
	14 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	6.029.833	
	15 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.371.500	
	16 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Ambon	1 Orang	4.469.866	
	17 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.614.966	
	18 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.973.933	
	19 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Laut	1 Orang	6.445.600	
	20 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	7.618.500	
	21 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	9.089.300	
	22 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	8.135.333	
	23 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	8.854.266	
	24 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.882.000	
	25 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.436.666	
	26 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Bengkulu	1 Orang	5.083.733	
	27 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	6.180.666	
	28 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.929.866	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	1 Layanan Informasi Gempabumi dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat	1000 orang	1.440.000.000	
	2 Layanan Informasi Gempabumi dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah	1200 Orang	1.170.000.000	
	3 Layanan Informasi Gempabumi dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur	300 Orang	890.000.000	
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	4 Layanan Informasi Pesisir Dulu dan Matahari	1 Layanan	358.254.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1 Layanan Informasi Meteorologi Maritim Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Barat	1 orang	1.130.000	
	2 Layanan Informasi Meteorologi Maritim Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Tengah	1 orang	1.350.000	
	3 Layanan Informasi Meteorologi Maritim Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Timur	1 orang	1.531.250	

9/15

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) (080)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Penelitian dan Pengembangan Produk			
	1. Paket Limbah Radioaktif Semi Cair/Resin Olahan Dalam Shell Beton	4 Produk	187.600.000	
	2. Paket Limbah Radioaktif Padat Olahan Dalam Drum	100 Produk	260.620.000	
	3. Paket Limbah Radioaktif Cair Olahan Dalam Drum Shell Beton	2 Produk	389.741.000	
	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir			
	4. Data Dosis Radiasi Eksternal dan Internal Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong	1 Rekomendasi	97.635.000	
	5. Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong	1 Rekomendasi	276.771.000	
	6. Rekomendasi Hasil Uji Profisiensi Laboratorium di BATAN untuk Pengukuran Radiasi Gamma	1 Rekomendasi	186.830.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
081.01	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)			
	SRK Total Biaya Keluaran			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	1 Jasa Pelatihan Teknologi Polymer (PNBP)	1 Layanan	240.464.000	

SK

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
082.01	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Data dan Informasi Publik			
	1. Data Pengjenderaan Jauh Terproduksi Hasil Alkuisisi (Rendah, Menengah, Tinggi)	1 Layanan	251.726.000	
	2. Data Pengjenderaan Jauh Terproduksi Hasil Alkuisisi (Sangat Tinggi)	1 Layanan	188.824.000	
	3. Data Pengjenderaan Jauh Terproduksi Hasil Alkuisisi (SAR)	1 Layanan	32.574.000	
	Data dan Informasi Publik			
	4. Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Sumedang)	1 Layanan	93.564.000	
	5. Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Pasuruan)	1 Layanan	104.432.000	
	6. Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Pontianak)	1 Layanan	109.710.000	
	7. Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Agam)	1 Layanan	195.054.000	
	Data dan Informasi Publik			
	8. Data Telemetri Satelit LAPAN	1 Layanan	74.563.000	
	9. Data Misi Satelit	1 Layanan	49.109.000	
	10. Data Antariksa dan Atmosfer	1 Layanan	23.540.000	
	11. Data Antariksa dan Atmosfer (BUTPAA Garut)	1 Layanan	31.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pengawasan Pembangunan			
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	250.441.000	
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	250.441.000	
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha	1 Laporan	250.441.000	
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	332.709.000	
	Pengawasan Pembangunan			
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	250.441.000	
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	251.916.000	
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	153.598.000	
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	153.598.000	
	Pengawasan Pembangunan			
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
13	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
14	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
15	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
16	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
17	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
18	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
19	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
24	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
25	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
27	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
28	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
29	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengawasan Pembangunan			
30	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
32	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
33	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
34	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
35	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
36	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
37	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
38	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
39	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
40	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
41	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
42	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
43	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
44	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
45	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
46	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
47	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
48	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
49	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
50	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
54	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
55	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
56	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengawasan Pembangunan			
57	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
58	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
59	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
60	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
61	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
62	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
63	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
64	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
65	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	
	Pengawasan Pembangunan			
66	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	508.374.000	
	Pengawasan Pembangunan			
67	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
68	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	
	Pengawasan Pembangunan			
69	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	508.374.000	
	Pengawasan Pembangunan			
70	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
71	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	
	Pengawasan Pembangunan			
72	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	508.374.000	
	Pengawasan Pembangunan			
73	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	

B/S

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Sertifikasi Profesi dan SDM			
	1 Sertifikasi Person	1 Orang	677.000	
	2 Sertifikasi Bimbingan Teknis	1 Orang	3.272.000	
	Sertifikasi Produk			
	3 Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri	1 Produk	10.191.000	
	4 Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri	1 Produk	20.799.000	
	5 Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri	1 Produk	1.760.000	
	6 Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri	1 Produk	3.808.000	

Q5

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
093-01	Komisi Pemberantasan Korupsi SBK Indeks Biaya Keluaran Sertifikasi Profesi dan SDM 1. Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	1 Orang	1.438.200	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	Komisi Yudisial RI			
	EBK Total Biaya Keluaran			
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			
	1 Laporan Investigasi Penanganan Disgani Pelanggaran Kode Etik	22 Laporan	1.710.400.000	
	2 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Hasil Reformasi Jejak Hakim dan CHA	48 Hakim	2.894.730.000	
	3 Investigasi Pendalaman Kasus	2 Hakim	328.708.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
	4 Usulan Rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik	1 Rekomendasi	527.800.000	
	Standarisasi Profesi dan SDM			
	5 Standarisasi Calon Hakim Agung/Ad hoc di MA	48 Hakim	3.159.974.000	

95

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
107.01	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)			
	SRK Total Biaya Keluaran			
	Pemantapan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
	1 Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR	1 Laporan	143.667.000	
	2 Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR	1 Laporan	72.760.000	
	3 Siaga SAR Khusus Lebaran Unit Siaga SAR	1 Laporan	42.190.000	
	4 Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR	1 Laporan	48.327.000	
	5 Siaga SAR Khusus Nataru Pos SAR	1 Laporan	24.645.000	
	6 Siaga SAR Khusus Nataru Unit Siaga SAR	1 Laporan	13.560.000	
	SRK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana			
	7 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Petugas SAR	1 Orang	4.120.000	
	8 Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR	1 Orang	5.528.000	
	9 Diklat Dasar SAR	1 Orang	41.600.000	
	10 Diklat Perencanaan Operasi SAR	1 Orang	16.340.000	
	11 Diklat SAR di Air	1 Orang	16.370.000	
	12 Diklat SAR di Bangunan Runtuh	1 Orang	17.000.000	
	13 Diklat Teknis Komunikasi SAR	1 Orang	12.900.000	
	14 Diklat Medical First Responder	1 Orang	15.000.000	
	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	15 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	16 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	17 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	18 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	Koordinasi			
	19 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh	1 Kegiatan	100.002.000	
	20 Latihan SAR Beregu di Ketinggian	1 Kegiatan	38.510.000	
	21 Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan	1 Kegiatan	37.878.000	
	22 Latihan SAR Beregu di Air	1 Kegiatan	33.650.000	
	23 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	1 Kegiatan	107.944.000	
	24 Latihan SAR Satuan di Ketinggian	1 Kegiatan	40.522.000	
	25 Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	1 Kegiatan	50.778.000	
	26 Latihan SAR Satuan di Air	1 Kegiatan	46.247.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia (116) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
116.01	Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Komunikasi Publik			
1	Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	3.863.000	
2	Program Buletin Berita	1 Layanan	860.000	
3	Program Feature	1 Layanan	731.000	
4	Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.835.000	
5	Program Produksi Komentar	1 Layanan	495.000	
6	Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.607.000	
7	Program Produksi Filler	1 Layanan	361.000	
8	Program Siaran Wawancara	1 Layanan	567.000	
	Komunikasi Publik			
9	Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	1.218.000	
10	Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Layanan	4.948.000	
11	Program Produksi SPOT	1 Layanan	195.000	
12	Program Produksi Buletin Berita	1 Layanan	877.000	
13	Program Siaran Produksi Feature	1 Layanan	672.000	
14	Program Produksi Laporan Mendalam	1 Layanan	1.000.000	
15	Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.910.000	
16	Program Produksi Majalah Udara	1 Layanan	936.000	
17	Program Siaran Kuis	1 Layanan	408.000	
18	Program Produksi Sandiwara Radio	1 Layanan	1.829.000	
19	Program Siaran Penghormatan	1 Layanan	14.592.000	
20	Program Produksi Komentar	1 Layanan	460.000	
21	Program Produksi Dokumenter	1 Layanan	1.452.000	
22	Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.550.000	
23	Program Siaran Obrolan	1 Layanan	469.000	
24	Program Produksi Filler	1 Layanan	332.000	
25	Program Produksi Report On The Spot (ROS)	1 Layanan	82.000	
26	Program Siaran Pendekatan, Development Broadcasting Unit (DBU)	1 Layanan	3.020.000	
27	Program Siaran Wawancara	1 Layanan	587.000	
	Komunikasi Publik			
28	Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	4.661.000	
29	Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Layanan	6.207.000	
30	Program Produksi SPOT	1 Layanan	514.000	
31	Produksi Buletin Berita	1 Layanan	876.000	
32	Produksi Feature	1 Layanan	671.000	
33	Produksi Laporan Mendalam	1 Layanan	987.000	
34	Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.909.000	
35	Produksi Majalah Udara	1 Layanan	937.000	
36	Siaran Kuis	1 Layanan	408.000	
37	Program Produksi Komentar	1 Layanan	930.000	
38	Produksi Dokumenter	1 Layanan	1.451.000	
39	Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.495.000	
40	Siaran Obrolan	1 Layanan	469.000	
41	Program Produksi Filler	1 Layanan	335.000	
42	Produksi Report On The Spot (ROS)	1 Layanan	81.000	
43	Program Siaran Wawancara	1 Layanan	589.000	
44	Siaran Adlibs	1 Layanan	148.000	
45	Siaran Pendekatan, Development Broadcasting Unit (DBU)	1 Layanan	5.065.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut (119)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
119.01	Badan Keamanan Laut SBK Indeks Biaya Keluaran Operasi Bidang Keamanan 1 Operasi Udara Maritim	1 Operasi	5.762.552.000	

85

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (dalam rupiah)

Kode	Urutan	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
123.01	Sekretariat Jenderal BBK Indeks Biaya Keisaran Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1 Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan	1 Orang	34.885.000	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI